

# Keamanan dan Sekuritisasi

dalam Hubungan Internasional



Keamanan dan Sekuritisasi dalam Hubungan Internasional

Buku ini dimaksudkan untuk memperkaya kajian studi keamanan dalam hubungan internasional termasuk di dalamnya proses sekuritisasi. Buku ini mengulas perkembangan, termasuk pergeseran konsep keamanan dari keamanan tradisional dan mencuatnya konsep keamanan non-tradisional (*Non-Traditional Security*, NTS). Selain itu, buku ini menunjukkan proses, peran, dan efektivitas sekuritisasi dari beberapa isu keamanan oleh beberapa aktor negara dan aktor non-negara lainnya.

Buku ini secara lebih mendalam membahas perkembangan teori sekuritisasi yang dilengkapi beberapa analisis kasus sekuritisasi di beberapa negara di dunia khususnya di Asia. Dalam perkembangannya, teori sekuritisasi mengalami modifikasi terutama terkait dengan area pembahasan, aktor, peran *speech act*, luaran dan dampak sekuritisasi, serta kondisi-kondisi yang memengaruhi sekuritisasi dan desekuritisasi. Buku ini secara khusus mengkaji penerapan teori sekuritisasi dalam kasus-kasus keamanan non-tradisional, seperti: sekuritisasi isu eksploitasi seksual anak laki-laki di bawah umur di Afghanistan, sekuritisasi Muslim Uighur di Xinjiang Tiongkok, sekuritisasi isu narkoba di Filipina serta sekuritisasi kabut asap di ASEAN, Singapura, dan Indonesia serta upaya Indonesia dalam sekuritisasi *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*.

Buku ini menggarisbawahi dan menambahkan hal-hal yang esensial terkait dengan teori sekuritisasi, mengidentifikasi hal-hal penting yang berpengaruh terhadap sekuritisasi seperti peran *agency and structure* serta *media framing* di dalamnya. Buku ini *timely* karena menawarkan *insight* yang segar tentang sekuritisasi dari pelbagai isu keamanan non-tradisional mutakhir yang sering kali luput dari perhatian studi hubungan internasional. Tidak hanya mendalami pergeseran konsep keamanan dan proses sekuritisasi, buku ini diharapkan mampu untuk mendampingi para pelajar dan peneliti Hubungan Internasional dalam menganalisis perkembangan isu-isu keamanan dan proses sekuritisasi terhadap isu-isu mutakhir lainnya.

MELVANA MEDIA  
Perumahan Batam  
Jl. Batam Raya No. 8  
Pasir Gunung Selatan, Kelapa Dua  
Depok, Jawa Barat  
Telp. 021-22327635  
www.melvanamedia.com  
IG. @penerbitmelvana



Agus Trihartono  
Suyani Indriastuti  
Chairun Nisya

# **KEAMANAN DAN SEKURITISASI DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Agus Trihartono  
Suyani Indriastuti  
Chairun Nisya

2020

# KEAMANAN DAN SEKURITISASI DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL

karya Agus Trihartono, Suyani Indriastuti,  
Chairun Nisya  
Copyright © 2019, Agus Trihartono, Suyani  
Indriastuti, Chairun Nisya

Hak cipta dilindungi undang-undang  
*All rights reserved*

Penyunting: Redaksi Melvana  
Desain Sampul: Melvana Design  
Penata Isi: Melvana Design

Cetakan Pertama, Januari 2020

ISBN: 978-623-7439-16-5



Perumahan Batam  
Jl. Batam Raya No. 8  
Pasir Gunung Selatan, Kelapa Dua  
Depok, Jawa Barat

# KATA PENGANTAR

**P**uji syukur kehadiran Allah SWT, Shalawat serta Salam kami curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berkat rahmat, petunjuk serta karunia-Nya akhirnya kami mampu menyelesaikan buku yang berjudul “Keamanan dan Sekuritisasi dalam Hubungan Internasional”. Buku ini menjelaskan pergeseran studi keamanan dari konsep keamanan tradisional ke konsep keamanan non tradisional. Buku ini juga menjelaskan tentang konsep sekuritisasi *Copenhagen School* dan hasil modifikasi konsep tersebut. Keduanya kemudian diaplikasikan kepada beberapa studi kasus sekuritisasi di negara-negara Asia.

Dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada beberapa pihak yang menjadi penyokong dalam perwujudan buku ini, antara lain: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Universitas Jember khususnya LP2M melalui program Hibah Buku Teks Tahun 2019 Nomor Kontrak : 4704/UN25.3.1/

LT/2019, Centre for Research in Sosial Sciences and Humanities (C-RiSSH) dan para narasumber yang tidak dapat kami sebutkan. Selain itu, juga rekan-rekan yang telah membantu dalam menuangkan kemampuannya dalam buku ini. Secara khusus kami berterima kasih kepada Bapak Abubakar Eby Hara, Ph.D, Fikry Zuledy Pamungkas, S.Sos, dan Nur Muhammad Wildan F U, S.Sos.

Terakhir, jika ada bagian yang baik dari buku ini, bagian tersebut ada karena segala bantuan dan dukungan mereka. Namun, kalau ada bagian yang kurang dari buku ini, itu semua sepenuhnya dan semata-mata karena keterbatasan penulis.

**Jember, 20 Januari 2020**

**Para penulis**

Agus Trihartono

Suyani Indriastuti

Chairun Nisya

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>PENDAHULUAN PERKEMBANGAN STUDI KEAMANAN DAN SEKURITISASI .....</b>	<b>i</b>
Teori Sekuritisasi Copenhagen School .....	4
Modifikasi Teori Sekuritisasi .....	8
Referensi.....	16
<b>BAB I SEKURITISASI TERHADAP TRADISI BACHA BAZI DI AFGHANISTAN.....</b>	<b>17</b>
Pendahuluan.....	17
Sejarah Bacha Bazi .....	19
Praktik Tradisi Bacha Bazi.....	21
Bacha Bazi sebagai Ancaman Kemanusiaan .....	27
Upaya Sekuritisasi terhadap Bacha Bazi .....	33
Identifikasi Proses Sekuritisasi terhadap Bacha Bazi .....	35

Penutup .....	49
Referensi.....	51

**BAB 2**  
**SEKURITISASI TERHADAP ETNIS UIGHUR**  
**DI XINJIANG ..... 55**

Pendahuluan.....	55
Provinsi Xinjiang dan Muslim Uighur .....	58
Sekuritisasi terhadap Uighur di Xinjiang .....	61
Keberlanjutan Upaya Sekuritisasi Muslim Uighur.....	72
Penutup .....	79
Referensi.....	81

**BAB 3**  
**SEKURITISASI NARKOBA DI FILIPINA..... 87**

Pendahuluan.....	87
Sekuritisasi, Speech act dan Media Framing.....	89
Gambaran Umum Peredaran dan Penggunaan Narkoba di Filipina .....	93
Sekuritisasi Narkoba di Filipina .....	97
Sekuritisasi HAM Sebagai ‘Counter-movement’ Sekuritisasi Narkoba Duterte .....	110
Referensi.....	115

**BAB 4**  
**SEKURITISASI KABUT ASAP (HAZE) DI ASEAN,**  
**INDONESIA, DAN SINGAPURA..... 127**

Pendahuluan.....	127
Two-Level Games Analysis dan Sekuritisasi Kabut Asap di Asia Tenggara .....	129
Sekuritisasi Polusi Kabut Asap di Singapura.....	133
Sekuritisasi Polusi Kabut Asap di Indonesia .....	140
Sekuritisasi Polusi Kabut Asap di ASEAN.....	147
Penutup .....	151
Referensi.....	154

**BAB 5**  
**SEKURITISASI ILLEGAL, UNREPORTED AND**  
**UNREGULATED FISHING**  
**(IUUF) DI INDONESIA..... 163**

Pendahuluan.....	163
Teori Sekuritisasi .....	166
Negara sebagai Referent Object .....	171
Ekosistem Laut sebagai Referent Object .....	179
Pertanyaan tentang Desekuritisasi .....	186
Penutup .....	195
Referensi.....	197



<b>KESIMPULAN .....</b>	<b>205</b>
<b>GLOSARIUM.....</b>	<b>217</b>
<b>INDEKS .....</b>	<b>219</b>
<b>TENTANG PENULIS .....</b>	<b>221</b>

# PENDAHULUAN PERKEMBANGAN STUDI KEAMANAN DAN SEKURITISASI

Studi keamanan telah mengalami pergeseran semenjak awal tahun 1990-an. Definisi “keamanan” dipertanyakan dan diinterpretasikan menjadi beberapa pengertian baru. Dalam pengertian tradisional, “keamanan” hanya mencakup keamanan yang berkaitan dengan negara dan usaha untuk menghadapi kekuatan militer negara lain. Namun, menurut Buzan, Weaver, dan Wilde dalam pengertian yang lebih modern, studi keamanan berfokus pada aktor non-negara dan ancaman non-militer (Buzan, Waever, and Wilde 1998). Studi keamanan yang modern tersebut disebut juga *Non-Traditional Security* (NTS). Isu-isu dalam NTS dilihat sebagai segala bentuk ancaman yang tidak hanya mengancam kedaulatan negara dan teritorialnya, tetapi juga mengancam keamanan masyarakat, baik kelompok maupun individu.

Redefinisi studi keamanan tersebut sesuai dengan perkembangan dalam hubungan antarnegara di dunia baik dalam aspek politik,

ekonomi, hingga sosial. Dalam perkembangannya, muncul beberapa konsep-konsep keamanan baru dalam studi keamanan yang digunakan sebagai alat untuk memahami dinamika keamanan negara-negara di dunia. Salah satunya adalah konsep keamanan manusia atau *human security*. Keamanan manusia merupakan pendekatan alternatif untuk menjelaskan tentang ancaman yang membahayakan individu atau kelompok masyarakat dalam kehidupan sehari-hari (Caballero-Anthony, Emmers, and Acharya 2004).

*Human security* secara formal pertama kali dicetuskan oleh UNDP (*United Nations Development Programme*) dalam laporan tahunannya yang berjudul *Human Development Report 1994*. Dalam laporan tersebut, UNDP memperkenalkan istilah *human security* dan mendefinisikannya sebagai '*safety from such chronic threats as hunger, disease and repression*', as well as '*protection from sudden and hurtful disruptions in the patterns of daily life-whether in homes, in jobs or in communities*' (UNDP, 1994: 23). Definisi ini menunjukkan sebuah cakupan yang luas dalam keamanan manusia, meliputi *freedom from want* (terbebas dari rasa kekurangan), *fear* (terbebas dari rasa takut), and *to live in dignity* (hidup bermartabat). Ancaman terhadap keamanan manusia bersumber dari tujuh dimensi, yaitu ekonomi, pangan, lingkungan, kesehatan, politik, personal, dan komunitas/kemasyarakatan.

Dalam dimensi ekonomi masyarakat harus terjamin kemakmurannya dan jauh dari kemiskinan dan pengangguran. Dalam dimensi lingkungan hidup, masyarakat harus mendapatkan kualitas lingkungan yang sehat dan bersih meliputi udara yang jauh dari polusi, terlindungi dari kelangkaan sumber daya, dampak perubahan iklim, hingga bencana

alam. Dalam dimensi pangan, masyarakat harus terlindungi dan bebas dari ancaman kelaparan dan kelangkaan bahan pangan. Untuk mewujudkan keamanan pangan ini, bahan pangan harus tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat. Selanjutnya, dalam dimensi kesehatan, masyarakat harus terlindungi dari penyakit mematikan dan/atau menular. Dalam konteks dimensi kemasyarakatan, masyarakat juga harus merasa aman untuk menjadi bagian dari kelompok minoritas dan terlindungi haknya. Dimensi keamanan personal terkait dengan kondisi di mana masyarakat bebas dari ancaman kekerasan dalam keluarga, di luar rumah, terorisme, semua kejahatan kriminal, hingga eksploitasi anak. Terakhir, dalam dimensi politik, masyarakat harus terlindungi dari represi dan pelanggaran hak manusia.

Konsep keamanan manusia yang ditawarkan oleh UNDP mendapat respons beragam. Jepang mendukung UNDP dan secara aktif turut mengembangkan *framework* untuk mengimplementasikan konsep keamanan manusia dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Sejalan dengan UNDP, konsep keamanan manusia yang diajukan oleh Jepang memiliki cakupan yang luas dan sering kali disebut *the broad approach to human security* atau *the Japanese approach*. Jepang juga mengartikan keamanan manusia secara luas sebagai perlindungan menyeluruh terhadap *freedom from want, fear, and to live in dignity*, misalnya terbebas dari penyakit, kemiskinan, masalah lingkungan, terorisme, dan segala sesuatu yang dapat mengancam keberlangsungan hidup manusia (Remacle, 2008).

Kanada juga memiliki definisi tersendiri mengenai keamanan manusia yang disebut sebagai *the Canadian approach to human security*. Kanada

mendefinisikan keamanan manusia dalam cakupan yang sempit yaitu keamanan manusia dapat tercapai dengan adanya kebebasan dari rasa takut (*freedom of fear*) dalam proses membangun perdamaian dalam situasi konflik (Remacle 2008). Kanada juga menjelaskan bahwa keamanan yang terwujud juga harus dapat melindungi masyarakat dari konflik, ranjau tanam, ancaman terhadap anak yang berpotensi menjadi sasaran kekerasan seksual, perbudakan, tentara anak, hingga segala bentuk kekerasan.

Dengan berkembangnya konsep-konsep keamanan, berkembang pula teori-teori tentang bagaimana sebuah ancaman dapat ditangani oleh para aktor. Salah satu teori yang telah menjadi dasar dari beberapa studi keamanan di dunia adalah teori sekuritisasi yang dikemukakan oleh *Copenhagen School* yang disebut *Copenhagen School of Securitization and Desecuritization theory*. Dalam perkembangannya, teori sekuritisasi yang disampaikan *Copenhagen School* ini juga mengalami modifikasi. Berikut ini penjelasan tentang teori yang dikemukakan oleh *Copenhagen School* beserta model modifikasinya.

## **TEORI SEKURITISASI COPENHAGEN SCHOOL**

Dalam bukunya yang berjudul *Security: A Framework for Analysis*, Buzan, Waever, dan Wilde menjelaskan bahwa studi keamanan adalah tentang *survival* (Buzan, Waever, and Wilde 1998). Di dalam buku tersebut dijelaskan bahwa studi keamanan tidak hanya tentang persoalan negara dan militer tetapi juga beberapa bidang lainnya yaitu ekonomi, politik, sosial, dan lingkungan. Dalam studi yang sama, ketiganya juga merumuskan tiga tahapan dalam proses sekuritisasi sebuah isu, yaitu

tahap non-politis (*non-politicized*), politis (*politicized*), dan tersekritisasi (*securitized*) (Caballero-Anthony and Emmers, 2006). Sebuah isu berada pada tahap non-politis ketika isu tersebut menjadi bagian dari diskusi masyarakat dan belum menjadi perbincangan pada level pemerintahan. Selanjutnya isu tersebut akan masuk ke dalam proses politis ketika isu tersebut menjadi topik perbincangan, perundingan, hingga perdebatan pada level pemerintahan. Terakhir, sebuah isu dikatakan telah tersekritisasi ketika aktor, baik negara maupun non-negara, telah menyepakati adanya ancaman dan perlunya *emergency measure* untuk mengatasi ancaman tersebut (Buzan, Waeber, and Wilde 1998).

Para aktor sekritisasi juga dapat menggunakan *speech act* sebagai alat untuk mengonstruksi isu menjadi sebuah ancaman keamanan dan untuk meyakinkan dan memberi peringatan masyarakat akan bahaya yang ditimbulkan dari ancaman tersebut. Tindakan tersebut diharapkan dapat menggiring opini publik dan memberikan aktor-aktor sekritisasi kesempatan untuk memobilisasi kekuasaan negara dalam membentuk peraturan demi menghentikan ancaman yang ada. Penggunaan *speech act* sangatlah penting dalam teori sekritisasi Copenhagen dan merupakan penentu keberhasilan atau kegagalan dari sebuah proses sekritisasi.

Selain itu, mazhab Copenhagen juga dapat menjelaskan dua hal penting yang dilakukan oleh aktor sekritisasi, yaitu bagaimana dan kapan sebuah masalah dapat dikatakan sebagai sebuah ancaman. Mazhab ini juga menjelaskan bahwa sebuah proses sekritisasi akan dinilai baik dan berhasil ketika masyarakat sebagai *referent object* atau pihak yang terancam pada akhirnya percaya akan adanya ancaman

dari sebuah masalah. Secara umum, teori sekuritisasi dan desekuritisasi *Copenhagen school* dapat digunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan penting dalam proses sekuritisasi dan desekuritisasi, yaitu (Caballero-Anthony, Emmers, and Acharya 2004):

- Siapa dan apa yang menjadi *referent object*? Jawaban dari pertanyaan ini dapat berupa individu atau kelompok masyarakat. Selain itu beberapa hal yang juga mencakup keamanan nasional, lingkungan, dan ekonomi yang berkaitan dengan keberlangsungan hidup manusia.
- Siapa saja yang menjadi aktor sekuritisasi? Jawaban dari pertanyaan ini dapat berupa aktor pemerintah atau non-pemerintah.
- Siapa saja yang menjadi aktor desekuritisasi? Jawaban pertanyaan ini dapat berupa semua aktor, baik pemerintah atau non-pemerintah, yang menyatakan bahwa sebuah ancaman tidak lagi mengancam keamanan individu, kelompok, atau apa pun yang berkaitan dengan keberlangsungan hidup manusia.
- Bagaimana proses sekuritisasi dilakukan? Pertanyaan ini berfokus terhadap bahasa sebagai alat untuk menyampaikan pesan yang digunakan oleh para aktor sekuritisasi untuk meyakinkan *referent object* akan adanya ancaman dari masalah atau isu tertentu.

Walaupun menjadi sebuah teori yang penting dalam perkembangan studi keamanan, teori sekuritisasi dan desekuritisasi *Copenhagen school* belum sepenuhnya menjawab pertanyaan yang muncul dalam proses

sekuritisasi sebagaimana yang disampaikan oleh Caballero-Anthony, Emmers, dan Acharya. Pertama, mazhab Copenhagen tidak menjawab pertanyaan akan motif atau latar belakang terjadinya sebuah proses atau upaya sekuritisasi (Caballero-Anthony, Emmers, and Acharya, 2004). Sebuah proses sekuritisasi pada akhirnya akan memerlukan sebuah langkah politis yang harus dilakukan oleh aktor sekuritisasi, khususnya negara. Langkah politis dalam proses sekuritisasi tersebut memerlukan pengadaan sumber daya yang memerlukan dukungan dari pihak atau aktor-aktor penting dalam sekuritisasi. Sebaliknya, desekuritisasi juga dilatarbelakangi oleh motifasi dari para aktor dalam proses tersebut. Misalnya, politisi dan elite militer dapat mengeksploitasi proses sekuritisasi dengan motif untuk menaikkan nilai anggaran militer.

Kedua, teori sekuritisasi dan desekuritisasi dari mazhab Copenhagen juga tidak menjawab apa yang menjadi tolak ukur keberhasilan proses sekuritisasi? Sejauh ini, *Copenhagen School* mengukur keberhasilan sekuritisasi berdasarkan keyakinan subjektif yang dibangun oleh *referent object* mengenai suatu ancaman (Caballero-Anthony, Emmers, and Acharya 2004). Penilaian subjektif tersebut terjadi karena suatu kasus dapat dipresepsikan berbeda oleh kelompok yang berbeda. Sebagai contoh, isu rasisme bukanlah sebuah ancaman bagi kelompok mayoritas dalam sebuah negara, namun merupakan sebuah ancaman bagi kelompok minoritas.

Ketiga, *Copenhagen School* bersifat *Euro-centric*, yang mana teori sekuritisasi dan desekuritisasi yang dicetuskan oleh Buzan dan kawan-kawan menjadi kurang relevan dalam konteks sekuritisasi di negara-negara Dunia Ketiga, mengingat adanya perbedaan kondisi



ekonomi, politik, hingga sosial antara negara-negara Eropa dan Dunia Ketiga. Teori tersebut setidaknya belum dapat dijadikan acuan untuk menjelaskan dinamika yang cenderung berbeda yang ada di negara-negara Dunia Ketiga.

Terakhir, mazhab Copenhagen tidak mengkaji tentang efektivitas dari aksi-aksi atau kebijakan yang diambil untuk mengatasi ancaman setelah dilakukannya *speech act*. Dengan hanya melihat keberhasilan dari proses sekuritisasi berdasarkan keyakinan *referent object* terhadap adanya ancaman, teori tersebut tidak dapat menjelaskan dinamika yang sebenarnya. Secara empiris, sekuritisasi juga tidak selalu dapat dijadikan solusi untuk menangani sebuah ancaman. *Copenhagen School* tidak mengkaji dampak yang ditimbulkan oleh *speech act* yang dapat menekan sebuah ancaman.

## **MODIFIKASI TEORI SEKURITISASI**

Meski menjadi sebuah teori yang sangat penting dalam perkembangan studi keamanan, teori yang dipopulerkan oleh Buzan dan kawan-kawan belum dapat menjelaskan beberapa pertanyaan dan dinamika yang ada di negara-negara non-Eropa. Modifikasi ini bertujuan untuk melengkapi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab dalam mazhab Copenhagen. Modifikasi ini menyangkut tujuh aspek, yaitu area pembahasan, aktor sekuritisasi, konsep keamanan, proses, tingkatan sekuritisasi, dampak upaya sekuritisasi terhadap ancaman, dan kondisi-kondisi yang memengaruhi keberhasilan proses sekuritisasi (Caballero-Anthony, Emmers, and Acharya 2004).

Area pembahasan berfokus pada adanya ancaman yang diidentifikasi sebagai existential threat, di dalam prosesnya tentu ada suatu konsensus yang dilakukan oleh para aktor sekuritisasi misalnya pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, untuk menindaklanjuti adanya ancaman terhadap keamanan bersama. Dengan melakukan hal tersebut kita dapat menelusuri dinamika proses sekuritisasi dan melihat masalah yang terjadi dalam proses aktor sekuritisasi untuk meyakinkan relevant audience yang menjadi pihak terancam dari adanya ancaman keamanan.

Aktor sekuritisasi akan digunakan untuk menjawab pertanyaan “siapa yang melakukan sekuritisasi?” dan kepentingan siapa yang diwakili dalam menjalankan proses sekuritisasi. Selain itu Emmers ingin membuktikan bahwa negara bukan satu-satunya aktor utama dalam proses sekuritisasi suatu isu. Menurutnya, aktor-aktor selain negara memiliki peranan penting dalam masyarakat terlebih pada proses sekuritisasi dan sejauh apa kepentingan kaum marjinal dalam suatu wilayah dapat terpenuhi karena menyangkut keamanan individu, kelompok masyarakat dan negara.

Konsep keamanan menurut Emmers ditujukan untuk mengklasifikasikan untuk siapa keamanan tersebut digunakan. Misalnya, negara akan menggunakan konsep keamanan nasional sebagai konsep keamanan yang dipakainya untuk melakukan sekuritisasi, NGO akan menggunakan konsep keamanan manusia, dan pihak internasional akan menggunakan konsep keamanan internasional sebagai dasar dari tindakan sekuritisasinya. Dengan penggunaan konsep keamanan yang berbeda oleh para aktor sekuritisasi ini akan membentuk suatu dinamika proses yang unik. Dengan begitu maka isu yang ditanggulangi

oleh masing-masing aktor sekuritisasi akan menghasilkan keluaran yang berbeda. Selanjutnya, Ia menggarisbawahi dua pertanyaan berkaitan dengan aktor sekuritisasi, yaitu apakah ada hubungan antara para aktor sekuritisasi yang ada? bila ada, bagaimana bentuk dari hubungan yang terjalin?

Proses sekuritisasi, Emmers memberikan tiga poin penting untuk meneliti proses sekuritisasi. Pertama, mekanisme *speech act* memunculkan sebuah ancaman. Kedua, ancaman yang ada memunculkan mekanisme *speech act*. Ketiga, munculnya *existential threat* baru atau muncul kembali sebagai ancaman yang dahulunya telah tersekuritisasi. Ia kemudian mengajukan pertanyaan sebagai berikut, apakah dengan penggunaan *speech act* sudah dapat untuk menangani suatu masalah atau diperlukan pernyataan yang sifatnya persuasif dan dilakukannya tindakan lain terhadap *existential threat*?

Tingkatan sekuritisasi yang dimaksud oleh Emmers ialah bagaimana akhir dari upaya sekuritisasi terhadap suatu isu. Apakah sekuritisasi tersebut berhasil atau justru sebaliknya gagal dan tidak menghasilkan keluaran yang baik dan mungkin pula ada keberhasilan yang dicapai disaat yang sama ada upaya yang gagal. Dalam tingkatan sekuritisasi, Emmers menjabarkan tentang bagaimana ukuran dari keberhasilan dari upaya sekuritisasi terhadap isu.

Dampak terhadap ancaman yang dimaksud oleh Emmers ialah bagaimana upaya sekuritisasi yang dilakukan oleh aktor sekuritisasi dapat berdampak terhadap ancaman yang ada. Ia menambahkan dalam proses pengkajian dampak terhadap ancaman diperlukan kajian mendalam secara kualitatif maupun kuantitatif. Kajian ini sangatlah

penting untuk dijadikan aspek untuk menilai seberapa jauh upaya yang dilakukan oleh aktor dalam menangani ancaman dengan melihat apakah ancaman tersebut mereda atau justru semakin naik atau tidak mendapatkan banyak dampak dari upaya sekuritisasi.

Kondisi yang memengaruhi sekuritisasi ialah faktor-faktor yang dapat memberikan pengaruh dan berdampak terhadap upaya sekuritisasi dan desekuritisasi yang dilakukan. Faktor-faktor tersebut terbagi menjadi lima, sebagai berikut :

- Pengaruh dari konsep-konsep keamanan yang berbeda  
Analisa konsep-konsep keamanan, dengan melihat setiap aktor sekuritisasi akan memiliki konsep yang berbeda dalam melakukan upaya sekuritisasi, misalnya negara akan mendasarkan konsep keamanannya dengan menggunakan keamanan nasional, keamanan komprehensif, dan keamanan manusia.
- Hubungan antar isu-isu keamanan.  
Analisa bagaimana aktor-aktor sekuritisasi dapat menghubungkan keterkaitan antara isu yang belum tersekuritisasi dengan isu yang telah dinyatakan sebagai ancaman keamanan.
- Peran aktor-aktor yang berwenang  
Analisa terhadap peran aktor-aktor sekuritisasi dan bagaimana peran para aktor melakukan proses sekuritisasi.
- Sistem politik domestik  
Analisa bagaimana sistem politik domestik yang ada dapat memberikan pengaruh di dalam proses sekuritisasi. Pengaruh tersebut dapat bersifat baik maupun buruk didasarkan pada

keadaan sistem politik domestik yang ada. Apakah keadaan politik domestik negara bersifat demokrasi atau justru otoritarian?

- Norma-norma internasional

Analisa terhadap norma-norma internasional yang mampu mengembangkan suatu isu yang mulanya isu yang tidak tersekuritisasi hingga isu tersebut disekuritisasi.

Dengan adanya modifikasi terhadap model sekuritisasi yang sebelumnya telah dikemukakan oleh Buzan, model tersebut diharapkan mampu menjelaskan beberapa kajian sekuritisasi di negara-negara Asia. Dalam buku ini akan dipaparkan beberapa kajian keamanan dan sekuritisasi terhadap beberapa isu keamanan non-tradisional di negara-negara Asia. Setelah pendahuluan ini, sistematika tulisan dalam buku ini adalah sebagai berikut:

Bab 1 buku ini membahas tentang eksploitasi seksual terhadap anak laki-laki di Afghanistan. Eksploitasi seksual yang menjadi sebuah tradisi nyatanya menimbulkan rentetan ancaman baik bagi masyarakat maupun Afghanistan sebagai negara. Upaya sekuritisasi yang telah diinisiasi oleh lembaga-lembaga seperti *Afghan Independent Human Rights Commission* (AIHRC) dan PBB diteruskan oleh dikeluarkannya *speech act* oleh pemerintah Afghanistan. Namun, upaya tersebut mengalami kegagalan karena beberapa faktor penentu keberhasilan sekuritisasi yang tidak dapat dipenuhi dalam proses sekuritisasi tersebut.

Bab 2 buku ini membahas tentang sekuritisasi terhadap warga Muslim Uighur di provinsi Xinjiang, Tiongkok. Sekuritisasi yang dilakukan pemerintah Tiongkok dimulai dengan proses konstruksi ancaman

inter-subjektif. Proses tersebut berlangsung dengan propaganda dan konstruksi pemerintah Tiongkok terhadap Muslim Uighur sebagai kelompok ekstremis. Upaya sekuritisasi tersebut merupakan salah satu contoh bagaimana *speech act* digunakan sebagai alat untuk mengonstruksi sebuah ancaman tertentu. Dalam proses sekuritisasi ini juga menunjukkan bahwa upaya sekuritisasi terhadap sebuah ancaman juga dapat memunculkan ancaman baru bagi kelompok masyarakat tertentu atau dalam hal ini adalah etnis Uighur.

Bab 3 buku ini membahas tentang sekuritisasi narkoba di Filipina. Kasus narkoba di Filipina menarik untuk dikaji karena kebijakan penanggulangan narkoba Filipina yang kontroversial, terutama pada masa pemerintahan presiden Rodrigo Duterte. Sekuritisasi narkoba justru mendorong munculnya sekuritisasi lain, yaitu sekuritisasi HAM sebagai *counter-movements* atas kebijakan-kebijakan pemberantasan narkoba yang diambil oleh Duterte.

Seiring dengan sekuritisasi narkoba pada level global terutama yang dilakukan oleh PBB, Filipina mulai menjadikan narkoba menjadi isu penting sejak tahun 1972 hingga saat ini. Namun bagaimana aktor mendefinisikan keamanan dan sejauh mana sekuritisasi narkoba dilakukan sangat bergantung pada kapasitas, prioritas, dan kapabilitas aktor yang bersangkutan. Secara umum, narkoba telah dianggap sebagai ancaman bagi masyarakat dan generasi mendatang, namun bagaimana aktor melakukan aksi untuk mengatasi ancaman tersebut berbeda-beda. Pemerintah sebelum Duterte melakukan pemberantasan narkoba dengan kebijakan-kebijakan yang relatif longgar. Sementara itu, presiden Duterte mengambil kebijakan yang ekstrem yaitu dengan

memberikan perintah kepada siapa saja (polisi atau masyarakat umum) untuk membunuh pencandu dan pengedar narkoba jika mereka melawan ketika ditangkap. Hal ini kemudian menyebabkan terjadinya pembunuhan massal yang kemudian dikonstruksi oleh aktivis HAM sebagai pelanggaran HAM berat.

Bab 4 buku ini membahas tentang sekuritisasi kabut asap di *Association of South East Asia Nations* (ASEAN), Singapura, dan Indonesia. Kabut asap yang bersumber dari kebakaran hutan di Indonesia telah melanda Asia Tenggara sejak tahun 1960-an. Namun konstruksi kabut asap sebagai ancaman baik terhadap *health, economic, environmental*, maupun *social security* baru terjadi pada tahun 1990-an. Dengan meminjam pendekatan *two-level games* analisis yang disampaikan oleh Robert Putnam, Bab 4 ini menganalisis sekuritisasi kabut asap dalam dua level: level ASEAN dan level domestik Singapura dan Indonesia. Aktor utama dalam sekuritisasi kabut asap di Asia Tenggara adalah Singapura dan Malaysia sebagai negara yang paling terdampak polusi kabut asap yang berasal dari Indonesia. Pemerintah Malaysia, Singapura, dan Indonesia telah menyepakati bahwa kabut asap merupakan ancaman bagi *human security*. Namun aksi nyata sebagai tidak lanjut konstruksi kabut asap sebagai ancaman terkesan lamban dan tidak efektif. Dalam hal ini, sekuritisasi berbenturan dengan kepentingan ekonomi politik aktor yang terlibat. Hal ini memengaruhi preferensi pemerintah terutama Indonesia dalam mengambil kebijakan penanggulangan kabut asap.

Bab 5 buku ini membahas tentang sekuritisasi terhadap *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* (IUUF) oleh pemerintah Indonesia. Keputusan Indonesia untuk menjalankan peraturan penenggelaman

kapal asing mendapatkan pelbagai reaksi dari dunia internasional dan nasional. Bab ini juga membahas bagaimana sebuah langkah sekuritisasi tidak selalu didefinisikan sebagai langkah yang diambil sebagai reaksi terhadap sebuah ancaman. Tetapi, sebuah langkah sekuritisasi juga dapat dilakukan sebagai media aplikasi peraturan yang telah disahkan. Langkah Indonesia dalam mengembangkan fokus ancaman, tidak hanya terhadap IUUF, tetapi juga kerusakan ekosistem laut dan kejahatan transnasional juga harus diapresiasi.

Bab terakhir tulisan ini adalah kesimpulan yang menggarisbawahi *findings* atau hal-hal penting dalam tulisan ini. Berangkat dari beberapa kelemahan *Copenhagen School* dalam menjelaskan sekuritisasi dan desekuritisasi sebagaimana yang diuraikan oleh Caballero-Anthony, Emmers, and Acharya (2004), tulisan ini berkontribusi untuk menemukan jawaban dari permasalahan tersebut dalam konteks Asia. Peran *structure* dan *agency* berpengaruh pada sejauh mana sekuritisasi didefinisikan, dijalankan serta bagaimana efektivitasnya.



## REFERENSI

- Buzan, Barry, Ole Waever, and Jaap de Wilde. 1998. *Security: A New Framework For Analysis*. Colorado: Lynne Rienner Publishers, Inc.
- Caballero-Anthony, Mely, and Ralf Emmers. 2006. *Understanding the Dynamics of Securitizing Non-Traditional Security*. eds. Mely Callabero-Anthony, Ralf Emmers, and Amitav Acharya. Hampshire: Ashgate.
- Caballero-Anthony, Mely, Ralf Emmers, and Amitav Acharya. 2004. *Non-Traditional Security in The Asia: The Dynamics of Securitisation*. Singapore: Eastern Universities Press.
- Human Security Unit. 2009. United Nations Trust Fund for Human Security *Human Security in Theory and Practice: An Overview of the Human Security Concept and the United Nations Trust Fund for Human Security*. New York: United Nations.
- Remacle, Eric. 2008. "Approaches to Human Security : Japan, Canada, and Europe in Comparative Perspective." *The Journal of Social Science* 66 (8): 5–34.
- United Nations Development Programme. (1994). *Human Development Report 1994 - Ch2 - New dimensions of human security*. United Nations Development Programme. [https://doi.org/http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/255/hdr\\_1994\\_en\\_complete\\_nostats.pdf](https://doi.org/http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/255/hdr_1994_en_complete_nostats.pdf)

# BAB I

# SEKURITISASI TERHADAP

# TRADISI BACHA BAZI DI

# AFGHANISTAN

## PENDAHULUAN

Eksplorasi seksual adalah sebuah kejahatan yang melibatkan sebuah kelompok atau individu yang mengeksploitasi seseorang dengan cara membujuk atau biasa disebut *grooming*. Organisasi *Parents Against Child Exploitation* (PACE) di Inggris mendeskripsikan *grooming* sebagai taktik yang digunakan oleh para pelaku eksploitasi seksual yang dilakukan secara berkala, secara langsung (*offline*) maupun dalam jaringan internet (*online*) untuk mengelabui korban (PACE, 2016). Meski korban dari eksplorasi seksual sebagian besar merupakan anak-anak, namun bukan tidak mungkin remaja dan orang dewasa menjadi korban dari eksploitasi seksual. Para pelaku biasanya mengincar orang-orang yang mereka anggap lebih lemah baik secara fisik, mental, ekonomi, jabatan, atau kelas dalam strata sosial.

Kasus eksploitasi seksual yang beragam dapat terjadi dalam skala kecil yang biasanya melibatkan kasus perorangan seperti antara guru dan murid seperti yang banyak terjadi di Nigeria. Kasus eksploitasi seksual di sekolah tidak hanya terjadi di Nigeria, namun juga di seluruh negara di mana sistem pendidikan masih buruk. Eksploitasi seksual yang terjadi di sekolah-sekolah tersebut merupakan hasil dari sistem pendidikan yang korup. Para pengajar dan staf sekolah akan membujuk para siswa untuk melakukan aktifitas seksual demi mendapatkan nilai yang baik (Odugbesan-Omede, 2019). Selain di sekolah-sekolah, eksploitasi seksual yang terjadi dalam skala lebih besar dalam sebuah struktur yang cukup sistematis dan mengarah ke kejahatan perdagangan manusia hingga perbudakan.

Studi tentang eksploitasi seksual pada awalnya merupakan kajian dalam studi-studi kriminologi dan sosiologi. Keduanya melihat kasus eksploitasi seksual sebagai akibat dari kemiskinan yang berkelanjutan dan adanya ketimpangan dalam masyarakat. Namun, dengan berkembangnya kasus eksploitasi seksual dalam skala yang cukup besar, berkembang pula studi eksploitasi seksual dalam kajian studi keamanan. Studi keamanan melihat eksploitasi seksual sebagai hasil dari, tidak hanya kemiskinan dan kesenjangan dalam masyarakat, tetapi juga hasil dari konflik yang berkepanjangan (UN News, 2019). Sejarah juga menunjukkan bahwa negara-negara seperti Jepang, Inggris, dan Amerika melakukan eksploitasi seksual pada era perang Dunia ke-2 (Daily Mail, 2013). Jepang memiliki sebuah jaringan sistematis yang mengatur adanya perbudakan seksual bernama *comfort women*. Sementara itu, kedua

Masyarakat miskin yang anak-anaknya diculik menyadari bahwa pengaduan ke pihak yang berwajib tidak akan membantu mereka. Ini disebabkan oleh kentalnya budaya korupsi dan para penegak hukum dikenal dengan keberpihakannya kepada pelaku *bacha* yang memiliki status sosial lebih tinggi. Dengan adanya ketimpangan gender dalam masyarakat dan budaya korupsi menjadikan norma kesetaraan gender dan keadilan tidak dapat ditransfer ke masyarakat Afghansitan.

## **PENUTUP**

Kesulitan dalam mencapai sebuah peraturan yang akan melindungi masyarakat dari ancaman tradisi *bacha bazi* membuat tradisi tersebut masih berlangsung dan berkembang di tengah masyarakat. Dengan ada dan berkembangnya ancaman *bacha bazi* di Afghanistan menyebabkan masyarakat kecewa dan tidak percaya dengan pemerintah Afghanistan. Sebagian masyarakat Afghansitan pun masih melihat Taliban sebagai penguasa yang lebih baik dibandingkan dengan pemerintah Afghanistan saat ini. Tingkat kepercayaan masyarakat Afghanistan yang rendah menyebabkan pemerintah melihat *bacha bazi* sebagai sebuah ancaman bagi stabilitas dan ekonomi politik Afghanistan. Hal tersebut pada akhirnya mendorong pemerintah Afghanistan untuk andil dalam proses sekuritisasi terhadap tradisi tersebut dengan mengeluarkan *speech act*.

Walaupun *speech act* telah dilakukan oleh ketiga aktor yaitu AIHRC, PBB, dan presiden Afghanistan yaitu Ashraf Ghani, sekuritisasi terhadap *bacha bazi* masih belum dinyatakan berhasil. Adanya pemerintahan yang korup menjadi masalah utama dari proses sekuritisasi tersebut. Minimnya upah bagi penegak hukum juga agaknya menjadi penyebab

mereka memperjual-belikan keadilan di Afghanistan. Selain itu, walaupun telah melakukan pemilihan umum, pada nyatanya demokrasi yang dicapai oleh Afghanistan belum sempurna. Sikap pemilih yang masih konsisten dalam memilih pemimpin sebelumnya membuat proses pergantian kekuasaan menjadi tidak berjalan dengan baik. Ketika masyarakat masih menempatkan orang-orang yang sama pada posisi strategis dalam pemerintahan, ini berarti kemungkinan untuk adanya pembentukan peraturan baru dalam pemerintah semakin kecil.

Selain itu, kemiskinan yang melanda negara ini menyebabkan banyak keluarga harus menjual anak laki-laknya ke para pelaku *bacha bazi*. Dengan adanya kemiskinan, tingkat pendidikan di Afghanistan pun juga cukup rendah. Minimnya tingkat pendidikan membuat masyarakat tidak menyadari norma-norma yang telah dilanggar atas adanya praktik *bacha bazi*. Normalisasi tersebut didorong adanya kebutuhan ekonomi masyarakat yang tidak dapat dipenuhi dengan baik karena memiliki ilmu dan keterampilan yang tidak memadai untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Sehingga selain karena lemahnya hukum dan adanya kemiskinan, normalisasi tradisi ini sebagai bentuk dari transaksi ekonomi juga mendorong pertumbuhan dari praktik *bacha bazi*.

## REFERENSI

- AIHRC. (2014). *Causes and Consequences of Bacha Bazi in Afghanistan*. Kabul. Retrieved from [http://www.aihrc.org.af/home/research\\_report/3324](http://www.aihrc.org.af/home/research_report/3324)
- BBC. (2017). Afghanistan profile - *Timeline* - BBC News. Retrieved January 23, 2018, from <http://www.bbc.com/news/world-south-asia-12024253>
- Buzan, B., Waever, O., & Wilde, J. de. (1998). *Security: A New Framework For Analysis*. Colorado: Lynne Rienner Publishers, Inc.
- Caballero-Anthony, M., & Emmers, R. (2006). *Understanding the Dynamics of Securitizing Non-Traditional Security*. (M. Callabero-Anthony, R. Emmers, & A. Acharya, Eds.). Hampshire: Ashgate.
- Daily Mail. (2013). Britain and US also kept sex slaves during World War Two, says Japanese mayor who claimed use of “comfort women” was justified. Retrieved January 5, 2020, from <https://www.dailymail.co.uk/news/article-2332027/Britain-US-kept-sex-slaves-World-War-Two-says-Japanese-mayor-Toru-Hashimoto.html>
- Ehsan, M., & Zohaib, M. (2016). Child Rape and Buggery in Pak-Afghan Cultural Society in the Eyes of Finkelhor ' s Precondition Child Sexual Abuse Model With Special Reference to Hosseini ' s Kite Runner and Pakistani Movie Bol. *The Canadian Social Sciences*, 7(4), 34–42. <https://doi.org/10.3968/8905>
- Erdogdu, E., Mcnett, S., Winstead, D., & Friend, R. (2016). Breaking the Stigma against Child Sex Trafficking and Bacha Bazi in Afghanistan. *The Journal of Penn States University*, 1–13.

- Frost, M. (2016). *BACHA, THE ODIIOUS AFFIX: THE ORIGINS AND CONSEQUENCES OF BACHA BAZI*. Indiana University.
- Goldstein, J. (2015). U.S. Soldiers Told to Ignore Sexual Abuse of Boys by Afghan Allies - *NYTimes.com*. *New York Times*. Retrieved from [http://mobile.nyTimes.com/2015/09/21/world/asia/us-soldiers-told-to-ignore-afghan-allies-abuse-of-boys.html?smid=tw-nyTimes&smtyp=cur&\\_r=2&utm\\_source=Sailthru&utm\\_medium=email&utm\\_campaign=NewCampaign&utm\\_term=%2AAfPak Daily Brief&referrer=](http://mobile.nyTimes.com/2015/09/21/world/asia/us-soldiers-told-to-ignore-afghan-allies-abuse-of-boys.html?smid=tw-nyTimes&smtyp=cur&_r=2&utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=NewCampaign&utm_term=%2AAfPak%20Daily%20Brief&referrer=)
- Graburn, N. H. H. (2001). What is Tradition? *The Journal of Museum Anthropology*, 24, 6–11.
- Heger, B. (2012). Democracy in Afghanistan. Retrieved June 4, 2018, from <http://www.oslocenter.no/en/2012/09/democracy-in-afghanistan/>
- Human Rights Watch. (2017). *“I won’t be a doctor, and one day you’ll be sick”: girls’ access to education in Afghanistan*. New York. Retrieved from [https://www.hrw.org/report/2017/10/17/i-wont-be-doctor-and-one-day-youll-be-sick/girls-access-education-afghanistan%0Ahttp://files/172/1HRW\\_Afghanistan2017\\_web.pdf](https://www.hrw.org/report/2017/10/17/i-wont-be-doctor-and-one-day-youll-be-sick/girls-access-education-afghanistan%0Ahttp://files/172/1HRW_Afghanistan2017_web.pdf)
- Janda, K. (2014). *The Challenge of Democracy: American Government in Global Politics* (Ninth). Boston: Wadsworth Cengage Learning.
- Jones, S. V. (2015). Ending Bacha Bazi : Boy Sex Slavery and the Responsibility To Protect Doctrine. *The John Marshall Institutional Repository*, 63.
- Katzman, K. (2011). *Afghanistan : Politics, Elections, and Government Performance*. Congressional Reseach Service. Washington D.C.

- L'Agence France-Presse. (2016). Afghan "bacha bazi" kidnappings: search for the victims | Daily Mail Online. Retrieved September 20, 2017, from <http://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-4047174/Afghan-bacha-bazi-kidnappings-search-victims.html>
- Mondloch, C. (2013). Bacha Bazi: An Afghan Tragedy | Foreign Policy. Retrieved September 8, 2017, from <http://foreignpolicy.com/2013/10/28/bacha-bazi-an-afghan-tragedy/>
- News Desk. (2017). How bacha bazi has still not ended in Afghanistan? Retrieved January 5, 2020, from <https://www.globalvillagespace.com/how-bacha-bazi-has-still-not-ended-in-afghanistan/>
- Odugbesan-Omede, Y. A. (2019). Sexual Exploitation of Students. Retrieved January 5, 2019, from <https://guardian.ng/opinion/sexual-exploitation-of-students/>
- PACE. (2016). The grooming process for child sexual exploitation. Retrieved January 5, 2020, from <https://paceuk.info/about-cse/the-grooming-process-in-the-spotlight/>
- Quraishi, N. (2010). *Dancing Boys*. United Kingdoms: Clover Films. Retrieved from [http://clover-films.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=8&Itemid=15](http://clover-films.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=15)
- Radio Free Europe/ Radio Liberty. (2016). *Afghan "Dancing Boys" Tell Of Rape, Abuse - YouTube*. YouTube. Czech Republic. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=oU6q6EaXBIM>
- Raza, S. (2016). The Most Corrupt Countries In The World [LIST]. Retrieved March 5, 2018, from <http://www.valuwalk.com/2016/02/the-most-corrupt-countries-in-the-world-list/>



- Reid, T. (2002). Kandahar comes out of the closet. Retrieved January 5, 2020, from <http://www.freerepublic.com/focus/fr/606581/posts>
- Russia Today. (2016). *"They prefer boys in Afghanistan": Dancing bachas recruited for sex (RT Documentary) - YouTube*. YouTube. Russia. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=eM-xe6wHjnw>
- Security Council. (2011). Statement by Chairman of Security Council Working Group on Children and Armed Conflict. Retrieved October 27, 2017, from <http://www.un.org/News/Press/docs/2011/sc10259.doc.htm>
- SIGAR. (2017). *Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction* (Vol. 36). Virginia.
- SMith, A., & Rahim, F. (2015). Afghanistan Vows to Stop "Inhuman" Child Sex Abuse - NBC News. Retrieved September 15, 2017, from <https://www.nbcnews.com/news/world/afghanistan-vows-stop-inhuman-child-abuse-after-new-york-times-n432741>
- UN News. (2019). Human trafficking cases hit a 13-year record high, new UN report shows. Retrieved January 5, 2020, from <https://news.un.org/en/story/2019/01/1031552>
- World Bank. (2017a). AFGHANISTAN POVERTY STATUS UPDATE: PROGRESS AT RISK Poverty, 6,7,36,40. Retrieved from <http://documents.worldbank.org/curated/en/667181493794491292/pdf/114741-WP-v1-P159553-PUBLIC.pdf>
- World Bank. (2017b). *Afghanistan Poverty Status Update – Progress at Risk*. Retrieved from <http://www.worldbank.org/en/country/afghanistan/publication/afghanistan-poverty-status-update-report-2017>

# **BAB 2**

# **SEKURITISASI**

# **TERHADAP ETNIS UIGHUR**

# **DI XINJIANG**

## **PENDAHULUAN**

Dalam dua abad terakhir telah terjadi banyak perubahan dalam studi keamanan. Setelah berakhirnya Perang Dingin, negara-negara di dunia memulai percakapan tentang studi keamanan yang tidak lagi memandang keamanan internasional dan nasional sebagai dua komoditi utama. Studi keamanan yang berfokus terhadap keamanan sebuah negara dari ancaman militer mulai dikaji kembali dari beberapa perspektif. Pengkajian ulang terhadap studi keamanan mulai memunculkan beberapa konsep dan pemahaman baru. Salah satunya adalah gagasan tentang keamanan yang tidak hanya berfokus terhadap ancaman yang mengancam negara tetapi juga kelompok-kelompok masyarakat, individual dan aktor non-negara lainnya. Pada masa kekuasaan bipolar tersebut juga terdapat beberapa ancaman berupa kekerasan etnis, runtuhnya beberapa negara, migrasi yang terjadi secara masif,

kejahatan antar negara dan penyebaran penyakit, pelanggaran HAM, masalah-masalah gender dan lingkungan, serta ketahanan pangan dan air bersih (Walt, 1991).

Dalam perjalanan mengembangkan studi keamanan, teori sekuritisasi *Copenhagen school* merupakan sebuah teori yang dikenal sebagai teori yang inovatif. Teori sekuritisasi yang diajukan oleh Buzan dan kawan-kawan tersebut menggarisbawahi perkembangan studi keamanan yang seharusnya tidak hanya membahas tentang keamanan nasional sebuah negara (Buzan, 1997). Teori tersebut sangatlah penting untuk kajian awal paska Perang Dingin dalam membentuk masa depan kajian *non traditional security* (NTS) (Williams, 2003). Teori yang dicetuskan oleh Buzan memiliki garis besar bahwa studi keamanan merupakan studi yang membahas tentang *survival* (Buzan, Waever, & Wilde, 1998). Buzan juga menyatakan bahwa sebuah upaya sekuritisasi dapat dikatakan berhasil ketika publik menyadari adanya ancaman yang perlu diwaspadai melalui *speech act* (Caballero-Anthony, Emmers, & Acharya, 2004).

Walaupun telah berhasil memberikan ruang bagi aktor non-negara dan ancaman non-militer untuk dikaji, teori sekuritisasi yang dicetuskan oleh Buzan masih belum dapat menjelaskan dinamika upaya sekuritisasi yang berada di negara-negara Dunia Ketiga, seperti di Asia (Caballero-Anthony et al., 2004). Berbeda dengan negara-negara di Eropa, dinamika yang terjadi di negara-negara Dunia Ketiga seperti negara-negara Asia setelah masa penjajahan menunjukkan bahwa terdapat hubungan dua arah antara *speech act* dan ancaman itu sendiri. (Caballero-Anthony et al., 2004) Sebuah ancaman mampu mendorong aktor-aktor sekuritisasi

untuk melakukan *speech act* untuk mensekritisasi sebuah isu. Tetapi, dalam praktiknya, di negara-negara Asia sebuah *speech act* juga dapat menimbulkan ancaman bagi beberapa kelompok masyarakat.

Hubungan dua arah tersebut merupakan hasil dari pembentukan konsep ancaman yang terjadi secara eksistensial atau inter-subjektif (Caballero-Anthony et al., 2004). Sebuah konsep ancaman dapat dikatakan terbentuk berdasarkan proses eksistensial ketika sebuah opini publik mengenai sebuah ancaman tersebut tidak dikonstruksi oleh aktor tertentu, melainkan hasil dari kesadaran mereka sendiri. Contoh dari ancaman yang terbentuk melalui proses eksistensial yaitu ancaman dari penyakit. Sebuah penyakit menular dinilai sebagai sebuah ancaman tanpa adanya aktor tertentu yang mencoba memberi konstruksi terhadap opini masyarakat. Sedangkan melalui proses inter-subjektif berarti sebuah ancaman dibentuk oleh seorang aktor yang memiliki kepentingan untuk mengonstruksi opini publik tentang apa yang pantas disebut sebagai ancaman. Contoh dari ancaman tersebut adalah sekuritisasi terhadap etnis Uighur di provinsi Xinjiang, Tiongkok.

Pada bab ini akan dijelaskan bagaimana pemerintah Tiongkok melakukan propaganda mengenai etnis Uighur dan mensekritisasi Muslim Uighur di provinsi Xinjiang, Tiongkok. Dalam bab ini juga akan dijelaskan bagaimana sekuritisasi bukanlah proses yang statis dan dapat menjadi simbol politis dalam sebuah negara dengan kelompok mayoritas memiliki pengaruh paling kuat atas negaranya.

## **PROVINSI XINJIANG DAN MUSLIM UIGHUR**

Xinjiang yang terletak di bagian Barat Laut Tiongkok yang memiliki penduduk mayoritas Muslim. Sebelum menjadi bagian dari Tiongkok, Xinjiang merupakan wilayah Turkistan Timur dengan ibu kota bernama Kashgar. Namun, setelah menjadi bagian dari Tiongkok, ibu kota provinsi tersebut berpindah ke Urumqi (BBC News, 2018). Dengan masuknya Xinjiang sebagai wilayah Tiongkok, provinsi tersebut menjadi perbatasan baru antara Tiongkok dan beberapa negara lainnya seperti Mongolia, Tibet, Pakistan, Iran, Siberia dan Kashmir.

Sejak zaman dahulu, Xinjiang telah menjadi salah satu wilayah terpenting bagi ketersediaan energi Tiongkok (Duan, Wei, Zeng, & Ju, 2016). Sebagai sebuah provinsi yang memiliki wilayah lebih dari 1.6 juta km<sup>2</sup>, Xinjiang juga memiliki pasokan minyak serta pelbagai mineral dan hasil tambang yang berlimpah. Provinsi tersebut memiliki 56 tambang emas yang juga menjadikan Xinjiang sebagai penghasil emas terbesar kedua di dunia (Wong, 2014). Selain itu, Xinjiang juga diperkirakan mampu memberikan pasokan batu garam kepada dunia selama 1000 tahun dengan produksi tahunan mencapai 450.000 ton per tahun (Duan et al., 2016).

Xinjiang juga sering disebut sebagai "*national energi strategy base*" karena berlimpahnya energi yang ada di provinsi tersebut. Selain itu, energi yang bersumber dari Xinjiang juga memiliki pasar dan peminat yang cukup banyak. Tiongkok juga telah mengembangkan teknologi yang berbasis di Xinjiang untuk mengeksploitasi dan mengeksplorasi kekayaan Xinjiang. Semua bentuk pembangunan yang dibuat oleh pemerintah Tiongkok adalah untuk memastikan bahwa industry energi

propaganda dan prasangka terhadap Muslim yang mengarah pada hasutan dan intoleransi. *Islamophobia* juga sering disebutkan sebagai gerakan yang “berakar pada rasisme dan merupakan jenis rasisme yang menargetkan ekspresi Muslim atau Muslim yang dipersepsikan” (Zahid, 2019). *Islamophobia* sangat kontras dengan semangat ide-ide politik liberal yang melarang diskriminasi orang berdasarkan ras dan agama. *Islamophobia*, pada kenyataannya, adalah klaim identitas yang mewakili Muslim sebagai ancaman terhadap cara hidup Barat berdasarkan pada biner oposisi, ‘kita’ versus ‘mereka’ dan ‘dalam’ versus ‘keluar’.

*Islamophobia* memiliki dua aspek: strategis dan populis. Keduanya terinspirasi oleh identitas dan saling membentuk satu sama lain untuk tujuan politik yang jelas. Kebangkitan Tiongkok dan keseimbangan pemikiran kekuasaan selanjutnya telah mengurangi dimensi strategis. Namun, krisis ekonomi domestik dan kebangkitan nasionalisme sayap kanan telah memberi jalan kepada aspek populis dari *islamophobia*.

## **PENUTUP**

Sekuritisasi terhadap etnis Uighur oleh pemerintah Tiongkok dilakukan dengan cara pembentukan ancaman berdasarkan metode inter-subjektif. Proses ini dimulai dengan pemerintah Tiongkok yang menyebutkan etnis Uighur sebagai sumber bahaya terhadap keamanan Tiongkok. Setelah adanya diskriminasi yang menimbulkan kesenjangan sosial, ekonomi, dan kurangnya hak politik yang didapatkan etnis Uighur. Perlawanan etnis Uighur dijadikan alat untuk memperburuk situasi yang terjadi di Tiongkok. Pemerintah Tiongkok pada masa Mao yang membebaskan adanya hak beragama berganti dengan

pemerintahan Tiongkok yang mengekang kebebasan tersebut. Pada pemerintahan saat ini, berkaca dengan banyaknya aksi terror di luar Tiongkok, memberikan tekanan yang represif terhadap masyarakat Muslim Uighur. Dalam proses sekuritisasi ini juga dapat diidentifikasi bagaimana sebuah upaya sekuritisasi dan *speech act speech act* yang dilakukan pemerintah Tiongkok bukan muncul untuk menghentikan sebuah ancaman. Namun sebaliknya, *speech act* tersebut menyebabkan ancaman kepada kelompok minoritas yaitu Uighur.

Dalam menindaklanjuti program sekuritisasi terhadap etnis Uighur, pemerintah Tiongkok menerapkan beberapa aturan khusus. Aturan khusus tersebut membatasi adanya pergerakan dari masyarakat Uighur. Dimulai dengan penempatan angkatan bersenjata, hingga adanya kamera pengintai dengan teknologi tinggi untuk memastikan setiap kegiatan warga Uighur dapat diawasi. Selain itu, pemerintah juga menahan beberapa warga Uighur tanpa adanya peradilan melalui program yang disebut sebagai program re-edukasi. Pada program tersebut, masyarakat Uighur juga dipekerjakan secara paksa dan pemerintah Tiongkok menyatakan program tersebut ada untuk mengasah kemampuan dan keterampilan masyarakat Uighur.

## REFERENSI

- Amnesty International. (2019). Tiongkok: Government must show proof that Xinjiang detainees have been released. Retrieved from <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/12/Tiongkok-government-must-show-proof-that-xinjiang-detainees-have-been-released/>
- BBC News. (2018). Xinjiang territory profile. Retrieved January 5, 2020, from <https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-16860974>
- BBC News. (2019). Data leak reveals how Tiongkok “brainwashes” Uighurs in prison camps. Retrieved January 10, 2020, from <https://www.bbc.com/news/world-asia-Tiongkok-50511063>
- BBCMSAP (1998) ‘Army, police on alert in Uighur cities during festival period’, 4 April. BBCMSAP (2000) ‘Xinjiang sends 18 “splittists elements” to jail’, 30 April.
- Bitter Winter. (2018). Disappearing Mosques of Xinjiang. Retrieved from <https://bitterwinter.org/disappearing-mosques-of-xinjiang/>
- Bovingdon, G. (2004). Autonomy in Xinjiang : Han nationalist imperatives and Uighur discontent. Retrieved January 15, 2020, from <https://scholarspace.manoa.hawaii.edu/handle/10125/3492>
- Bruno, G. (2009). Painting Democracy on Afghanistan | Council on Foreign Relations. Retrieved January 10, 2020, from <https://www.cfr.org/interview/painting-democracy-afghanistan>
- Butterfield, F. (1980) ‘Moslems prospering in rugged Chinese border area’, *The New York Times*, October 29, p. A2.
- Buzan, B. (1997). Rethinking Security after the Cold War. *Cooperation and Conflict*, 32(1), 5–28. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/45084375>



- Buzan, B., Waeber, O., & Wilde, J. de. (1998). *Security: A New Framework For Analysis*. Colorado: Lynne Rienner Publishers, Inc.
- Caballero-Anthony, M., Emmers, R., & Acharya, A. (2004). *Non-Traditional Security in The Asia: The Dynamics of Securitisation*. Singapore: Eastern Universities Press.
- CPC (1996) Record of the Meeting of the Standing Committee of the Political Bureau of the Chinese Communist Party concerning the maintenance of Stability in Xinjiang (Document 7), reproduced in Human Rights Watch (1998) *Tionggok: State Control of Religion: Update #1*, March 1998.
- Connor, W. (1984) *The National Question in Marxist-Leninist Theory and Strategy*, Princeton: Princeton University Press.
- Dautcher, J. (2004) 'Public health and sosial pathologies'. In Frederic S. Starr (ed.), *Xinjiang: Tionggok's Muslim Borderland* (Armonk, NY: ME Sharpe) pp. 216-238.
- Duan, J., Wei, S., Zeng, M., & Ju, Y. (2016). *The Energi Industry in Xinjiang, Tionggok: Potential, Problems, and Solutions*. Retrieved January 5, 2020, from <https://www.powermag.com/energi-industry-xinjiang-tionggok-potential-problems-solutions-web/>
- Ghosh, S., & Majumder, S. (2019). *Tionggok and Xinjiang: The Fate of BRI*. Retrieved January 10, 2020, from <https://thegeopolitics.com/Tionggok-and-xinjiang-the-fate-of-bri/>
- Lam, O. (2017) 'Tionggok's Xinjiang residents are being forced to install surveillance apps on their mobile phones', *Global Voices*, Retrieved January 10, 2020, from <https://advox.globalvoices>.

org/2017/07/19/Tiongkoks-xinjiang-residents-are-being-forced-to-install-surveillance-apps-on-mobile-phones

Lehr, A. K., & Bechrakis, M. (2019). Connecting the Dots in Xinjiang. Washington D.C. Retrieved from [https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/Lehr\\_ConnectingDotsXinjiang\\_interior\\_v3\\_FULL\\_WEB.pdf](https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/Lehr_ConnectingDotsXinjiang_interior_v3_FULL_WEB.pdf)

Lui, K. (2017). According to Chinese Propaganda, Children Around the World Just Love Beijing's Trade Policies. Retrieved January 10, 2020, from According to Chinese Propaganda, Children Around the World Just Love Beijing's Trade Policies

Maizland, L. (2019). Tiongkok's Repression of Uighurs in Xinjiang. Retrieved January 15, 2020, from <https://www.cfr.org/backgrounder/Tiongkoks-repression-uighurs-xinjiang>

McMillen, D. H. (1982) 'The Urumqi Military Region: Defense and Security in Tiongkok's West', *Asian Survey*, 22(8): 705-731.

McMillen, D. H. (1984) 'Xinjiang and Wang Enmao: New Directions in Power, Policy and Integration??', *The Tiongkok Quarterly*, 99: 569-593?.

Millward, J. (2007) *Eurasian Crossroads: A History of Xinjiang*, New York: Columbia University Press.

Rajagopalan, M. (2017). This Is What A 21st-Century Police State Really Looks Like. Retrieved January 5, 2020, from <https://www.buzzfeednews.com/article/meghara/the-police-state-of-the-future-is-already-here#.dj8W66PEN>

- Ramzy, A., & Buckley, C. (2019). 'Absolutely No Mercy': Leaked Files Expose How Tiongkok Organized Mass Detentions of Muslims. Retrieved January 16, 2020, from <https://www.nytimes.com/interactive/2019/11/16/world/asia/Tiongkok-xinjiang-documents.html>
- Rodríguez-Merino, P. A. (2018). Tiongkok ' s Protracted Securitization of Xinjiang : Origins of a Surveillance State. Retrieved January 5, 2020, from <https://www.e-ir.info/2018/08/15/Tiongkoks-protracted-securitization-of-xinjiang-origins-of-a-surveillance-state/>
- Shepherd, C. (2016). 'Oil and Water: Being Han in Xinjiang', by Tom Cliff. Retrieved January 5, 2020, from <https://www.ft.com/content/efb2f700-48df-11e6-b387-64ab0a67014c>
- Sun, J. (2017) 'The Quiet Undercurrents of South Xinjiang', Sixth Tone, 3 February. Retrieved January 5, 2020, from: <http://www.sixthtone.com/news/quiet-undercurrents-south-xinjiang>
- The Economist. (2018). Tiongkok has turned Xinjiang into a police state like no other. Retrieved January 5, 2020, from <https://www.economist.com/briefing/2018/05/31/Tiongkok-has-turned-xinjiang-into-a-police-state-like-no-other>
- The Editors of Encyclopaedia Britannica. (2018). Uighur.
- The Uighurs American Association. (2016). About Uighurs. Retrieved January 5, 2020, from <https://Uighuramerican.org/about-Uighurs>
- Thum, R. (2018). What Really Happens in Tiongkok's 'Re-education' Camps. Retrieved January 5, 2020, from <https://www.nytimes.com/2018/05/15/opinion/Tiongkok-re-education-camps.html>

- Uighur Congress. (2018). PRESS RELEASE: WUC CALLS ATTENTION TO THE CONTINUED DETENTION OF PROMINENT UIGHUR PROFESSIONALS. Retrieved from <https://www.Uighurcongress.org/en/wuc-calls-attention-to-the-continued-detention-of-prominent-Uighur-professionals/>
- Walt, S. M. (1991). The Renaissance of Security Studies. *International Studies Quarterly*, 35(2), 211–239. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/2600471>
- Williams, M. C. (2003). Words, Images, Enemies: Securitization and International Politics. *International Studies Quarterly*, 47(4), 511–531. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/3693634>
- Wong, E. (2014). Tiongkok Invests in Region Rich in Oil, Coal and Also Strife. Retrieved January 5, 2020, from <https://www.nyTimes.com/2014/12/21/world/asia/Tiongkok-invests-in-xinjiang-region-rich-in-oil-coal-and-also-strife.html>
- World Bank. (2019). BELT AND ROAD ECONOMICS: Opportunities and Risks of Transport Corridors. Washington D.C. Retrieved from <file:///C:/Users/Nisya-PC/Downloads/9781464813924.pdf>
- Zahid, M. Z. (2019). *Islamophobia: Securitization of Liberal Values*. Retrieved January 5, 2020, from <https://dailyTimes.com.pk/523330/islamophobia-securitization-of-liberal-values-daily-Times/>



# BAB 3

## SEKURITISASI NARKOBA DI FILIPINA

### PENDAHULUAN

Peredaran narkoba secara ilegal saat ini telah menjadi permasalahan internasional yang cukup meresahkan. *The United Nations Offices on Drugs and Crime/ UNODC* dalam laporan tahunannya yang bertajuk *the World Drug Report 2019* menyebutkan bahwa sekitar 5.5 % penduduk dunia yang berusia antara 15 hingga 64 tahun telah menjadi pengguna narkoba. Pada tahun 2017, sekitar 585.000 orang meninggal dunia akibat penyalahgunaan narkoba. Peredaran narkoba secara global mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari sekitar 50 *metric tons* (MT) pada tahun 2007 menjadi sekitar 247 MT pada tahun 2017 (UNODC, 2019b). Hal tersebut menunjukkan bahwa peredaran narkoba telah menjadi ancaman yang nyata bagi umat manusia.

Maraknya penggunaan dan peredaran narkoba ilegal menuai respons dari pelbagai kalangan. Kampanye anti narkoba gencar dilaksanakan

baik oleh kalangan pemerintah maupun non-pemerintah. Misalnya, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo mencanangkan slogan 'Indonesia Darurat Narkoba'. Pemerintah Malaysia melaksanakan program '*Malaysia's War on Drugs*'. Sementara itu, presiden Filipina Rodrigo Duterte mengeluarkan kebijakan '*Drugs War*' sebagai bentuk perang terhadap narkoba.

Tulisan ini fokus untuk mengkaji persoalan narkoba di Filipina. Filipina dipilih sebagai kasus dalam kajian ini karena fenomena penanggulangan narkoba di Filipina sangat kontroversial. Sejatinya narkoba di Filipina telah menjadi isu penting yang menjadi perhatian pemerintah setidaknya sejak 1972 di mana pemerintah Filipina mengeluarkan undang-undang anti narkoba. Hal ini adalah wajar mengingat secara universal narkoba telah dianggap sebagai ancaman. Bahaya narkoba telah disekuritisasi secara mendunia baik oleh kalangan pemerintah maupun non-pemerintah seperti *non-government organisations* (NGO) dan media masa. Pemerintah, NGO, dan media masa telah menggiring opini yang negatif tentang pengguna dan pengedar narkoba bahwa narkoba dapat menghancurkan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, sejauh ini masyarakat dunia telah mendukung kampanye anti-narkoba (Mahinay, 2018).

Namun demikian, sekuritisasi narkoba yang dilakukan oleh presiden Filipina Duterte (2016 – sekarang) lebih menarik untuk dikaji jika dibandingkan dengan penanggulangan narkoba yang dilakukan oleh presiden-presiden Filipina sebelumnya. Meskipun pemerintah sebelumnya seperti Gloria Machapagal Arroyo dan Benigno Aquino III juga memiliki perhatian terhadap narkoba, tetapi hukuman yang

nyata bagi kehidupan masyarakat. Namun demikian, kebijakan-kebijakan yang diambil untuk mengendalikan narkoba berbeda-beda.

Dalam kasus Filipina, presiden-presiden Filipina memiliki persepsi yang berbeda-beda tentang urgensi pengendalian narkoba. Kebijakan-kebijakan yang mereka ambil banyak dipengaruhi oleh 'norma' bahaya narkoba dan juga produk-produk hukum internasional yang mereka ratifikasi. Sebagaimana dijelaskan oleh Friedrich Kratochwill bahwa '*rules and norms*' berperan penting dalam proses konstruksi suatu kasus. Meskipun *rules and norms* dirumuskan atau diubah oleh aktor-aktor politik, tetapi pada akhirnya *rules and norms* yang bersifat universal akan diterima dan mengikat tingkah laku sosial politik aktor (Zehfuss, 2009). Namun demikian, sejauh mana aktor mempersepsikan urgensi dan tindakan apa yang diambil dipengaruhi oleh *agency* atau kapasitas dan kepentingan masing-masing aktor. Dalam hal ini, Duterte merupakan aktor utama dalam sekuritisasi narkoba di Filipina, setidaknya sejak 2016 hingga saat ini. Duterte mempersepsikan persoalan narkoba sudah sangat kritis di Filipina, oleh karena itu harus diberantas hingga ke akar-akarnya melalui '*war on drug*'.



## REFERENSI

- Al Jazeera*. (2016a). Duterte cites Hitler, wants to kill millions of addicts | News | *Al Jazeera*. Retrieved January 2, 2020, from <https://www.aljazeera.com/news/2016/09/duterte-cites-hitler-kill-millions-addicts-160930043443768.html>
- Al Jazeera*. (2016b). Rodrigo Duterte: Shoot a drug dealer, get a medal | News | *Al Jazeera*. Retrieved January 2, 2020, from <https://www.aljazeera.com/news/2016/06/rodrigo-duterte-shoot-drug-dealer-medal-160605140900213.html>
- Alexandra Sims. (2016). Rodrigo Duterte compares himself to Hitler and pledges to “slaughter three million drug addicts” | *The Independent*. Retrieved January 2, 2020, from *The Independent* website: <https://www.independent.co.uk/news/world/asia/rodrigo-duterte-compares-himself-to-hitler-and-pledges-to-slaughter-three-million-drug-addicts-a7338786.html>
- Amnesty International. (n.d.). Death Penalty | Amnesty International. Retrieved December 31, 2019, from Amnesty International website: <https://www.amnesty.org/en/what-we-do/death-penalty/>
- Amnesty International. (2019a). Philippines: UN investigation urgently needed into Duterte administration’s murderous “war on drugs” | Amnesty International. Retrieved January 2, 2020, from Amnesty International website: <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/07/philippines-un-investigation-urgently-needed-duterte-war-drugs/>
- Amnesty International. (2019b). Philippines: Withdrawal from the ICC must spur UN action | Amnesty International. Retrieved January 3, 2020,

- from Amnesty International website: <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/03/philippines-withdrawal-icc-spur-un-action/>
- Ang Pangako. (n.d.). Victims - Ang Pangako. Retrieved January 1, 2020, from Ang Pangako website: <https://angpangako.net/data-maps/victims>
- AsiaNews.it. (2017). PHILIPPINES Duterte says no to “foreign interference”, rejects 250 million euros in EU aid. Retrieved January 3, 2020, from AsiaNews.it website: <http://www.asianews.it/news-en/Duterte-says-no-to-“foreign-interference”,-rejects-250-million-euros-in-EU-aid-40772.html>
- Atun, J. M. L., Mendoza, R. U., David, C. C., Cossid, R. P. N., & Soriano, C. R. R. (2019). The Philippines’ antidrug campaign: Spatial and temporal patterns of killings linked to drugs. *International Journal of Drug Policy*. <https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2019.07.035>
- Balzacq, T. (2010). Securitization theory: How security problems emerge and dissolve. In *Securitization Theory: How Security Problems Emerge and Dissolve*. <https://doi.org/10.4324/9780203868508>
- BBC News. (2016). Jewish leaders react to Rodrigo Duterte Holocaust remarks - BBC News. Retrieved January 2, 2020, from <https://www.bbc.com/news/world-asia-37515642>
- BBC News. (2019). Philippines drug war: Do we know how many have died? - BBC News. Retrieved January 2, 2020, from BBC News website: <https://www.bbc.com/news/world-asia-50236481>
- Bradley, D. G. (2010). A Conversation with Benigno S. Aquino III | Council on Foreign Relations. Retrieved December 31, 2019, from

- Council on Foreign Relations website: <https://www.cfr.org/event/conversation-benigno-s-aquino-iii-0>
- Bureau for International Narcotics and Law, & Enforcement Affairs. (2011). *Money Laundering and Financial Crimes Country Database*. Retrieved from <https://2009-2017.state.gov/documents/organization/164239.pdf>
- Cabato, R. (2019). Duterte's drug war is wildly popular, despite thousands dead as former police chief faces charges - *The Washington Post*. Retrieved January 2, 2020, from *The Washington Post* website: [https://www.washingtonpost.com/world/asia\\_pacific/thousands-dead-police-accused-of-criminal-acts-yet-dutertes-drug-war-is-wildly-popular/2019/10/23/4fdb542a-f494-11e9-b2d2-1f37c9d82dbb\\_story.html](https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/thousands-dead-police-accused-of-criminal-acts-yet-dutertes-drug-war-is-wildly-popular/2019/10/23/4fdb542a-f494-11e9-b2d2-1f37c9d82dbb_story.html)
- Campbell, C. (2016a). Philippines: How Rodrigo Duterte Got to Brink of Presidency | *Time*. Retrieved December 30, 2019, from *Time* website: <https://Time.com/4312083/rodrigo-duterte-philippines-presidency/>
- Campbell, C. (2016b). Rodrigo Duterte Wins Philippines Presidential Election | *Time*. Retrieved December 30, 2019, from *Time* website: <https://Time.com/4322806/rodrigo-duterte-philippines-presidential-election-wins/>
- Campbell, C. (2016c). The Next President of the Philippines Could Be "the Punisher" | *Time*. Retrieved December 30, 2019, from *Time* website: <https://Time.com/4285417/the-next-president-of-the-philippines-could-be-the-punisher/>

- Chan Robles Virtual Law Library. (n.d.). PHILIPPINE LAWS, STATUTES AND CODES - CHAN ROBLES VIRTUAL LAW LIBRARY. Retrieved December 29, 2019, from <http://www.chanrobles.com/executiveorderno61estradajanuary151999.html#.XghPPkf7TIU>
- Congress of the Philippine. R.A. 6425., Congress of the Philippine § (1972).
- Corrales, N. (2017). With drug war questioned, Palace showers Aquino with figures | Inquirer News. Retrieved December 31, 2019, from Inquirer News website: <https://newsinfo.inquirer.net/919620/with-drug-war-questioned-palace-showers-aquino-with-figures>
- Dangerous Drug Board. (2019). Home: Drug Statistics. Retrieved December 28, 2019, from Office of the President Republic of the Philippines website: <https://www.ddb.gov.ph/45-research-and-statistics>
- Debrix, F. (2015). Language, agency, and politics in a constructed world. In *Language, Agency, and Politics in a Constructed World*. <https://doi.org/10.4324/9781315702988>
- Duffy, G., & Frederking, B. (2009). Changing the rules: A *speech act* analysis of the end of the Cold War. *International Studies Quarterly*. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2478.2009.00536.x>
- Ellis-Petersen, H. (2019). UN launches “comprehensive” review of Philippine drug war | World news | *The Guardian*. Retrieved January 3, 2020, from *The Guardian* website: <https://www.theguardian.com/world/2019/jul/12/un-launches-comprehensive-review-of-philippine-drug-war>

- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. *Journal of Communication*. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x>
- Eroukhmanoff, C. (2018). Securitisation Theory: An Introduction. Retrieved December 28, 2019, from E-International Relations Students website: <https://www.e-ir.info/2018/01/14/securitisation-theory-an-introduction/>
- Espenido, G. (2018). Philippines' War on Drugs: Its Implications to Human Rights in Sosial Work Practice. *Journal of Human Rights and Social Work*. <https://doi.org/10.1007/s41134-018-0071-6>
- Felipe Villamor. (2016). Duterte, Citing Hitler, Says He Wants to Kill 3 Million Addicts in Philippines - *The New York Times*. Retrieved January 2, 2020, from *The New York Times* website: <https://www.nytimes.com/2016/10/01/world/asia/philippines-rodrido-duterte-hitler-drugs.html>
- GMA News Online. (2006). Gloria Arroyo on the death penalty: A *Timeline* | News | GMA News Online. Retrieved December 31, 2019, from GMA News Online website: <https://www.gmanetwork.com/news/news/content/25087/gloria-arroyo-on-the-death-penalty-a-Timeline/story/>
- GMA News Online. (2011). PNoy and Pinoys Abroad: Drug trafficking under the Aquino admin | News | GMA News Online. Retrieved December 31, 2019, from GMA News Online website: <https://www.gmanetwork.com/news/news/pinoyabroad/224851/pnoy-and-pinoys-abroad-drug-trafficking-under-the-aquino-admin/story/>

- Gunia, A. (2019). Philippines: Leaves International Criminal Court | *Time*. Retrieved January 3, 2020, from *Time* website: <https://Time.com/5553323/philippines-leaves-international-criminal-court/>
- Hampson, F. O., Buzan, B., Waever, O., & Wilde, J. de. (1998). Security: A New Framework for Analysis. *International Journal*. <https://doi.org/10.2307/40203739>
- Holmes, O. (2016). Rodrigo Duterte vows to kill 3 million drug addicts and likens himself to Hitler | World news | *The Guardian*. Retrieved January 2, 2020, from *The Guardian* website: <https://www.theguardian.com/world/2016/sep/30/rodrigo-duterte-vows-to-kill-3-million-drug-addicts-and-likens-himself-to-hitler>
- Human Right Watch. (2012). Philippines: Two Years Under Aquino, Abuses Go Unpunished | Human Rights Watch. Retrieved December 31, 2019, from *Human Right Watch* website: <https://www.hrw.org/news/2012/06/27/philippines-two-years-under-aquino-abuses-go-unpunished>
- Human Right Watch. (2019). Philippines' 'War on Drugs' | Human Rights Watch. Retrieved December 27, 2019, from <https://www.hrw.org/tag/philippines-war-drugs>
- Inquirer News. (2015a). *City of Davao* ranks as 9th safest in the world | Inquirer News. Retrieved December 30, 2019, from Inquirer News website: <https://newsinfo.inquirer.net/690252/davao-city-ranks-as-9th-safest-in-the-world>
- Inquirer News. (2015b). Duterte on criminals: 'Kill all of them' | Inquirer News. Retrieved December 30, 2019, from

- Inquirer News website: <https://newsinfo.inquirer.net/691527/dutertes-secret-in-keeping-davao-city-phs-safest-kill-criminals>
- International Criminal Court. (n.d.). The Philippines. Retrieved January 3, 2020, from International Criminal Court website: <https://www.icc-cpi.int/philippines>
- Jennings, R. (2019). Is the Deadly Philippine Anti-Drug Campaign Getting Less Deadly? | Voice of America - English. Retrieved January 3, 2020, from Voice of America website: <https://www.voanews.com/east-asia-pacific/deadly-philippine-anti-drug-campaign-getting-less-deadly>
- Kanato, M., Choomwattana, C., Sarasiri, R., & Leyatikul, P. (2018). *ASEAN Drugs Monitoring Report 2017*.
- Kine, P. (2015). Rodrigo Duterte: The Rise of Philippines' Death Squad Mayor | Human Rights Watch. Retrieved December 30, 2019, from The Mark News website: <https://www.hrw.org/news/2015/07/17/rodrigo-duterte-rise-philippines-death-squad-mayor>
- Mahinay, K. J. (2018). Framing the War on Drugs in the Philippines. *Akademik İncelemeler Dergisi (AID)*. <https://doi.org/10.17550/AKADEMIKINCELEMELER.310556>
- Mcdonald, M. (2008). The *Copenhagen School* and the Construction of Security. *European Journal of International Relations*. <https://doi.org/10.1177/1354066108097553>
- Mendiola, R. (2019). Survei: Majority of Filipinos still satisfied with anti-drug campaign — Asian Journal News. Retrieved January 3, 2020, from Asian Journal News website:

- <https://www.asianjournal.com/philippines/metro-manila/survei-majority-of-filipinos-still-satisfied-with-anti-drug-campaign/>
- National Post. (2016). 'Do it yourself if you have a gun': Philippine president encourages average citizens to kill drug dealers | National Post. Retrieved January 2, 2020, from National Post website: <https://nationalpost.com/news/world/do-it-yourself-if-you-have-a-gun-philippine-president-encourages-average-citizens-to-kill-drug-dealers>
- Obordo, R. (2016). "He's vulgar – but honest": Filipinos on Duterte's first 100 days in office | World news | *The Guardian*. Retrieved December 30, 2019, from *The Guardian* website: <https://www.theguardian.com/world/2016/oct/08/rodrigo-duterte-first-100-days-philippines-president>
- Parlemen Eropa. (2018). JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the Philippines. Retrieved January 3, 2020, from Parlemen Eropa website: [http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-8-2018-0198\\_EN.html](http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-8-2018-0198_EN.html)
- Rappler. (2019). IN NUMBERS: The Philippines' "war on drugs." Retrieved January 2, 2020, from Rappler.com website: <https://www.rappler.com/newsbreak/iq/145814-numbers-statistics-philippines-war-drugs>
- Rauhala, E. (2016). Duterte: Hitler killed millions of Jews, I will kill millions of drug addicts - *The Washington Post*. Retrieved January 2, 2020, from *The Washington Post* website: <https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/09/29/duterte-hitler-killed-3-million-jews-i-will-kill-3-million-drug-dealers/>



- Research Directorate, Immigration and Refugee Board of Canada, O. (2006). Refworld | Philippines: Government response to drug trafficking, and state protection available to police officers involved in the investigation of drug trafficking (2004-2006). Retrieved December 31, 2019, from Canada: Immigration and Refugee Board of Canada website: <https://www.refworld.org/docid/45f147932f.html>
- Reuters. (2017). Philippine police kills 32 in drugs war's bloodiest day - Reuters. Retrieved January 2, 2020, from <https://www.reuters.com/article/us-philippines-drugs/philippine-police-kills-32-in-drugs-wars-bloodiest-day-idUSKCN1AWOZL>
- Roth, K. (2019). World Report 2019: Philippines | Human Rights Watch. Retrieved January 2, 2020, from Human Rights Watch website: <https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/philippines>
- Shoemaker, P. J. (2013). Mediating the Message in the 21st Century. In *Mediating the Message in the 21st Century*. <https://doi.org/10.4324/9780203930434>
- Simbulan, N., Estacio, L., Dioquino-Maligaso, C., Herbosa, T., & Withers, M. (2019). The manila declaration on the drug problem in the Philippines. *Annals of Global Health*. <https://doi.org/10.5334/aogh.28>
- Snyder, L. J. (2017). *Stanford Encyclopedia of Philosophy Stanford Encyclopedia of Philosophy*. (September), 1–22. <https://doi.org/10.1111/1467-9973.00225>

- Stritzel, H. (2007). Towards a theory of securitization: Copenhagen and beyond. *European Journal of International Relations*. <https://doi.org/10.1177/1354066107080128>
- Stritzel, H. (2014). Security in Translation. In *Security in Translation*. <https://doi.org/10.1057/9781137307576>
- The Guardian*. (2016). Kill drug dealers and I'll give you a medal, says Philippines president | World news | *The Guardian*. Retrieved January 2, 2020, from <https://www.theguardian.com/world/2016/jun/05/kill-drug-dealers-medal-philippines-president-rodrigo-duterte>
- The Guardian*. (2018). *The Guardian* view on the Philippines: a murderous 'war on drugs' | Editorial | Opinion | *The Guardian*. Retrieved January 3, 2020, from *The Guardian* website: <https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/sep/28/the-guardian-view-on-the-philippines-a-murderous-war-on-drugs>
- The Philippine Drug Enforcement Agency. (2019). Drug Courier. Retrieved December 28, 2019, from The Philippine Drug Enforcement Agency website: <http://pdea.gov.ph/drug-trends/drug-courier>
- The Wall Street Journal. (2016). Philippines Election: Can the Country Stay on Track? - WSJ.com. Retrieved December 31, 2019, from The Wall Street Journal website: <http://graphics.wsj.com/philippines-election-2016-can-the-country-stay-on-track/>
- Thompson, M. R. (2016). Bloodied democracy: Duterte and the death of liberal reformism in the philippines. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*. <https://doi.org/10.1177/186810341603500303>

- Treaty section of the office of legal affairs. (2019). United Nations Treaty Collection. Retrieved December 31, 2019, from Treaty section of the office of legal affairs website: [https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg\\_no=VI-17&chapter=6&clang=\\_en](https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=VI-17&chapter=6&clang=_en)
- United Nations and the Rule of Law. (n.d.). Drug Trafficking - United Nations and the Rule of Law. Retrieved December 31, 2019, from United Nations and the Rule of Law website: <https://www.un.org/ruleoflaw/thematic-areas/transnational-threats/drug-trafficking/>
- United Nations Offices on Drugs and Crime. (n.d.-a). Annual prevalence of drug use | Statistics and Data. Retrieved December 28, 2019, from United Nations Offices on Drugs and Crime website: [https://dataunodc.un.org/drugs/prevalence\\_table-2017](https://dataunodc.un.org/drugs/prevalence_table-2017)
- United Nations Offices on Drugs and Crime. (n.d.-b). Global Seizures of drugs | Statistics and Data. Retrieved December 28, 2019, from United Nations Offices on Drugs and Crime website: [https://dataunodc.un.org/drugs/global\\_seizures-2017](https://dataunodc.un.org/drugs/global_seizures-2017)
- UNODC. (2019a). #ListenFirst on the World Drug Day 2017. Retrieved December 31, 2019, from United Nations Offices on Drugs and Crime website: <https://www.unodc.org/unodc/en/ngos/listenfirst-on-the-world-drug-day-2017.html>
- UNODC. (2019b). Executive Summary. Retrieved December 27, 2019, from The World Drug Report 2019 website: <https://wdr.unodc.org/wdr2019/en/exsum.html>
- Valente, C. S. (2019). Aquino blamed for drug problem – The Manila *Times*. Retrieved December 31, 2019, from Manila*Times*

website: <https://www.manilaTimes.net/2019/11/22/news/national/aquino-blamed-for-drug-problem/657719/>

Vultee, F. (2010). Securitization as a media frame: What happens when the media “speak security.” In *Securitization Theory: How Security Problems Emerge and Dissolve*. <https://doi.org/10.4324/9780203868508>

Zehfuss, M., (2009). Intersubjectivity and the normative: Kratochwil’s constructivism and German military involvement abroad. In *Constructivism in International Relations* (pp. 94–150). <https://doi.org/10.1017/cbo9780511491795.003>

# **BAB 4**

## **SEKURITISASI KABUT ASAP (HAZE) DI ASEAN, INDONESIA, DAN SINGAPURA**

### **PENDAHULUAN**

Saat ini isu-isu keamanan telah berkembang pesat, tidak hanya tentang keamanan tradisional dalam konteks keamanan teritorial dan kekuatan militer suatu negara, namun telah meluas pada isu-isu keamanan-keamanan non-tradisional. Salah satu contoh isu keamanan non-tradisional adalah ancaman polusi kabut asap (*haze*). Di kawasan Asia Tenggara, polusi kabut asap telah menjadi salah satu topik yang krusial karena terjadi secara reguler hampir setiap tahun yang mana terdapat beberapa kejadian yang ekstrem, misalnya tahun 1982/83, 1987, 1991, 1994, 1997/1998, 2002, dan beberapa tahun terakhir ini. Disinyalir sumber kabut asap tersebut adalah dampak kebakaran hutan yang terjadi di pulau Kalimantan dan Sumatera, Indonesia terkait dengan pembukaan lahan pertanian dan lahan perkebunan kelapa sawit di dua pulau tersebut.

Persoalan kabut asap saat ini telah menjadi perhatian masyarakat internasional karena dampaknya yang sangat signifikan, tidak hanya terhadap kesehatan tetapi juga menyangkut pembangunan berkelanjutan (CIFOR, 2003). Organisasi pemerintah seperti *Association of South East Asia Nations* (ASEAN) sebagai organisasi regional di Asia Tenggara telah mengeluarkan '*the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*' (AATHP) pada tahun 2002 sebagai bentuk respons atas polusi transnasional yang terjadi di kawasan ini. Perjanjian tersebut bertujuan untuk mencegah dan memonitor penyebaran polusi akibat kabut asap serta melakukan mitigasi kabut asap baik pada level nasional, regional maupun internasional (ASEAN, 2002a).

Meskipun AATHP telah ditandatangani pada tahun 2002, negara-negara ASEAN tidak serta merta meratifikasi perjanjian tersebut. Singapura sebagai negara terdampak kabut asap telah melakukan ratifikasi perjanjian tersebut pada tahun 2003, sesaat setelah perjanjian tersebut disepakati (the ASEAN Secretariat, 2020). Di sisi lain, Indonesia yang dinilai merupakan sumber penyebab terjadinya kabut asap meratifikasi AATHP pada tahun 2014, sekitar 12 tahun setelah AATHP disepakati. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan proses sekuritisasi kabut asap di masing-masing negara yang juga juga dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan sosial, ekonomi dan politik aktor-aktor yang terlibat.

Bab ini akan membahas sekuritisasi polusi kabut asap dari dua unit analisis yang berbeda. Meminjam istilah '*the logic of two-level games*' yang disampaikan oleh Robert D. Putnam (Putnam, 1988), tulisan ini akan mengkaji sekuritisasi pada level regional ASEAN dan

aktif melakukan sekuritisasi kabut asap pada level ASEAN. Mereka mengkonstruksi kabut asap sebagai ancaman nyata bagi *human security* masyarakat Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Pada akhirnya ASEAN menyetujui pembentukan *the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*.

Sekuritisasi kabut asap relatif kurang optimal di Indonesia. Hal tersebut diindikasikan dari lambannya pemerintah melakukan ratifikasi AATHP serta belum berhasilnya penanggulangan kebakaran hutan dan kabut asap. Dalam hal ini, sekuritisasi kabut asap di Indonesia berbenturan dengan kepentingan ekonomi politik, tidak hanya aktor-aktor local dan nasional tetapi juga perusahaan-perusahaan yang melakukan ekspansi bisnis terutama kepala sawit di Indonesia.

Teori sekuritisasi juga menjelaskan tentang desekuritisasi yaitu, menjadikan isu-isu yang penting dan dianggap *urgent* menjadi isu biasa. Pendek kata, desekuritisasi kebalikan dari sekuritisasi. Dalam konteks kabut di Asia Tenggara, tulisan ini berpendapat bahwa desekuritisasi belum terjadi. Salah satu indikator dalam desekuritisasi adalah masyarakat, media, maupun aktor-aktor lainnya tidak lagi memperbincangkan suatu kasus yang semula dianggap penting. Hingga awal tahun 2020 ini, media masa masih membahas tentang bahaya kabut asap. Di samping itu, pemerintah negara-negara ASEAN juga masih membahas isu kabut asap sebagai isu yang krusial.

## REFERENSI

- Acharya, A. (2009). Constructing a security community in Southeast Asia: ASEAN and the problem of regional order: Second edition. In *Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the Problem of Regional Order: Second Edition*. <https://doi.org/10.4324/9780203939239>
- Agence France-Presse. (2013). Singapore, Indonesia tussle over haze problem - YouTube. Retrieved January 13, 2020, from Agence France-Presse website: <https://www.youtube.com/watch?v=jggu777IE6o>
- Amalia, Y. (2019). Walhi: Kabut Asap Terus Berulang Bukti Negara Gagal Kelola SDA | merdeka.com. Retrieved January 16, 2020, from Merdeka.com website: <https://www.merdeka.com/peristiwa/walhi-kabut-asap-terus-berulang-bukti-negara-gagal-kelola-sda.html>
- ASEAN. (2002a). *Asean Agreement On Transboundary Haze Pollution*. Retrieved from [https://haze.asean.org/?wpfb\\_dl=32](https://haze.asean.org/?wpfb_dl=32)
- Azman, A. (2015). A history of the haze, Latest Singapore News - The New Paper. Retrieved January 12, 2020, from The New Paper website: <https://www.tnp.sg/news/singapore-news/history-haze>
- BeritaSatu. (2013). Presiden SBY Meminta Maaf Kepada Negara Tetangga - YouTube. Retrieved January 16, 2020, from <https://www.youtube.com/watch?v=NX735CXWRhw>
- (2015). SBY "Berkicau" Soal Kabut Asap yang Harus Dituntaskan - YouTube. Retrieved January 16, 2020, from [https://www.youtube.com/watch?v=YuCf-SH9\\_hQ](https://www.youtube.com/watch?v=YuCf-SH9_hQ)



- Channelnesasia/ CNA. (2019). Indonesia will 'truly be ashamed' if transboundary haze is not resolved, says President Jokowi - CNA. Retrieved January 16, 2020, from Channelnesasia website: <https://www.channelnewsasia.com/news/asia/indonesia-jokowi-haze-truly-ashamed-singapore-malaysia-11789028>
- Charles, D. (2019). Ilmuwan menyoal polusi asap kebakaran hutan di Indonesia - CIFOR Forests News. Retrieved January 16, 2020, from Cifor website: <https://forestsnews.cifor.org/62418/ilmuwan-menyoal-polusi-asap-kebakaran-hutan-di-indonesia?fnl=id>
- CIFOR Occasional Paper No. 38(i)*. (2003). Retrieved from [www.cifor.cgiar.org/publications/papers](http://www.cifor.cgiar.org/publications/papers).
- CNA. (2019). Haze in Singapore hits "unhealthy" levels, Sep 18 - YouTube. Retrieved January 13, 2020, from Youtube website: <https://www.youtube.com/watch?v=OzStH7jDDXo>
- Don Ramli, D. R., Hashim, R., & Mohammed, N. (2019). The Challenges of the ASEAN Way in Managing the Transboundary Haze Issue. In *Proceedings of the Second International Conference on the Future of ASEAN (ICoFA) 2017 - Volume 1*. [https://doi.org/10.1007/978-981-10-8730-1\\_47](https://doi.org/10.1007/978-981-10-8730-1_47)
- Down to Earth. (2002). Forest fires | Down to Earth. Retrieved January 16, 2020, from Down to Earth website: <https://www.downtoearth-indonesia.org/story/forest-fires>
- Edwards, S. A., & Heiduk, F. (2015). Hazy days: Forest fires and the politics of environmental security in Indonesia. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*. <https://doi.org/10.1177/186810341503400303>

- Elliott, L. (2003). ASEAN and environmental cooperation: Norms, interests and identity. *Pacific Review*. <https://doi.org/10.1080/0951274032000043235>
- Fako, E. (2012). Strategies of Desecuritization. *The Department of International Relations and European Studies*.
- Gaveau, D. (2014). Penelitian dapat menjadi kunci penguraian krisis kabut asap di Indonesia - CIFOR Forests News. Retrieved January 16, 2020, from <https://forestsnews.cifor.org/22511/penelitian-dapat-menjadi-kunci-penguraian-krisis-kabut-asap-di-indonesia?fnl=id>
- Gordon, J. (1998). *NGOs, the Environment and Political Pluralism in New Order Indonesia Explorations in Southeast Asian Studies*. Retrieved from <http://www.hawaii.edu/cseas/pubs/explore/gordon.html>
- Government of Singapore. (2020). Haze pollution | Infopedia. Retrieved January 11, 2020, from National Library Board website: [https://eresources.nlb.gov.sg/infopedia/articles/SIP\\_2013-08-30\\_185150.html](https://eresources.nlb.gov.sg/infopedia/articles/SIP_2013-08-30_185150.html)
- Greenpeace Indonesia. (2019). Indonesia Darurat Asap, Presiden Segeralah Bertindak! - Greenpeace Indonesia. Retrieved January 16, 2020, from Greenpeace Indonesia website: <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/3752/indonesia-darurat-asap-presiden-segeralah-bertindak/>
- Hurst, S. (2016). The Iranian nuclear negotiations as a two-level game: The importance of domestic politics. *Diplomacy and Statecraft*. <https://doi.org/10.1080/09592296.2016.1196075>
- Kirkpatrick, N. (2015). Singapore disappears into a thick haze caused by Indonesian fires - *The Washington Post*. Retrieved January

- 13, 2020, from *The Washington Post* website: <https://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2015/09/25/singapore-disappears-into-a-thick-haze-caused-by-indonesian-fires/>
- Kok, L. M. (2015). Haze in Singapore: A problem dating back 40 years, Environment News & Top Stories - *The Straits Times*. Retrieved January 12, 2020, from <https://www.straitstimes.com/singapore/environment/haze-in-singapore-a-problem-dating-back-40-years>
- Kompas. (2019). Riau Dikepung Kabut Asap, Greenpeace: Ini Indikasi Kegagalan Pemerintah Halaman all - Kompas.com. Retrieved January 16, 2020, from Kompas website: <https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/13/131729265/riau-dikepung-kabut-asap-greenpeace-ini-indikasi-kegagalan-pemerintah?page=all>
- Liang, G. T. (1972). Smoke Haze Over Singapore October 1972. Retrieved January 12, 2020, from Singapore Meteorological Service website: [https://eservice.nlb.gov.sg/data2/BookSG/publish/4/4b13f5ef-0474-4f3c-9e0e-26be6d01795a/web/html5/index.html?opf=tablet/BOOKSG.xml&launchlogo=tablet/BOOKSG\\_BrandingLogo\\_.png&pn=1](https://eservice.nlb.gov.sg/data2/BookSG/publish/4/4b13f5ef-0474-4f3c-9e0e-26be6d01795a/web/html5/index.html?opf=tablet/BOOKSG.xml&launchlogo=tablet/BOOKSG_BrandingLogo_.png&pn=1)
- Lim, J. (2020). As haze levels in Singapore worsen, the risk of dying increases: Study - TODAYonline. Retrieved January 13, 2020, from Today website: <https://www.todayonline.com/singapore/haze-levels-singapore-worsen-risk-dying-increases-study>
- Makdori, Y. (2019). WWF: Kebakaran Hutan Ancam Habitat Satwa Dilindungi - News Liputan6.com. Retrieved January 16, 2020, from Liputan6.com website:

- <https://www.liputan6.com/news/read/4065077/wwf-kebakaran-hutan-ancam-habitat-satwa-dilindungi>
- Malaysiakini. (2019). Haze an embarrassment: Jokowi. Retrieved January 16, 2020, from <https://www.malaysiakini.com/news/487020>
- Mayer, J. (2006). Transboundary perspectives on managing Indonesia's fires. *Journal of Environment and Development*. <https://doi.org/10.1177/1070496506288369>
- Ministry of Health Singapore. (2019). MOH | Haze Health Advisory for the Public. Retrieved January 13, 2020, from Ministry of Health Singapore website: <https://www.moh.gov.sg/resources-statistics/educational-resources/haze>
- Moravcsik, A. (1997). Taking preferences seriously: A liberal theory of international politics. *International Organization*. <https://doi.org/10.1162/002081897550447>
- Nishikawa, Y. (2010). Human security in Southeast Asia. In *Human Security in Southeast Asia*. <https://doi.org/10.4324/9780203850459>
- O'Callaghan, J. (2013). Singapore, Malaysia face economic hit from prolonged smog - Reuters. Retrieved January 12, 2020, from Reuters website: <https://www.reuters.com/article/us-southeastasia-haze-impact/singapore-malaysia-face-economic-hit-from-prolonged-smog-idUSBRE95N0BS20130624?irpc=932>
- Putnam, R. D. (1988). Diplomacy and domestic politics: The logic of two-level games. *International Organization*. <https://doi.org/10.1017/S0020818300027697>
- Rachman, T. (2019). CIFOR: Kabut Asap Tragedi, Bukan Bencana | Republika Online. Retrieved January 16, 2020, from Republika

- Online website: <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/nvwpc4219/cifor-kabut-asap-tragedi-bukan-bencana>
- Rahmawati, A. (2019). Tak Ada Asap Jika Tak Ada Api - Greenpeace Indonesia. Retrieved January 16, 2020, from Greenpeace Indonesia website: <https://www.greenpeace.org/indonesia/cerita/4314/tak-ada-asap-jika-tak-ada-api/>
- Stritzel, H. (2007). Towards a theory of securitization: Copenhagen and beyond. *European Journal of International Relations*. <https://doi.org/10.1177/1354066107080128>
- Takahashi, W. (n.d.). *Environmental Cooperation in Southeast Asia (draft)*.
- Tempo.co. (2006). DPR Tunda Ratifikasi Perjanjian Kabut Asap. *Tempo.Co*. Retrieved from <https://nasional.tempo.co/read/86097/dpr-tunda-ratifikasi-perjanjian-kabut-asap>
- The ASEAN Secretariat. (2020). ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution | ASEAN Haze Action Online. Retrieved January 11, 2020, from <https://haze.asean.org/asean-agreement-on-transboundary-haze-pollution-2/>
- The Malaysian Reserve. (2019). Haze: We are doing everything we can, says Jokowi. Retrieved January 16, 2020, from The Malaysian Reserve website: <https://themalaysianreserve.com/2019/09/18/haze-we-are-doing-everything-we-can-says-jokowi/>
- The Strait Times. (1972a). Haze Gets Worse. *The Strait Times*. Retrieved from [https://www.straitstimes.com/sites/default/files/attachments/2015/10/02/haze\\_gets\\_worse\\_oct\\_14\\_1972.pdf](https://www.straitstimes.com/sites/default/files/attachments/2015/10/02/haze_gets_worse_oct_14_1972.pdf)
- (1972b). Newspaper Article - The Straits Times WEDNESDAY, OCTOBER 18, 1972 PERSISTENT HAZE, *The Straits Times*, 18

- October 1972, Page 14. Retrieved January 12, 2020, from the Strait Times website: <https://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Article/straitsTimes19721018-1.2.64>
- (1982). Newspaper Article - Haze due to forest fires in Indonesia, The Straits Times, 13 October 1982, Page 13. Retrieved January 12, 2020, from the Strait Times website: <https://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Article/straitsTimes19821013-1.2.55>
- Varkkey, H. (2014). Regional cooperation, patronage and the ASEAN Agreement on transboundary haze pollution. *International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics*. <https://doi.org/10.1007/s10784-013-9217-2>
- (2012). *The Asean Way and Haze Mitigation Efforts*. Retrieved from <http://jjs.uum.edu.my>
- Voice of America. (2013). ASEAN Desak Indonesia Ratifikasi Perjanjian Terkait Kabut Asap. Retrieved January 16, 2020, from Voice of America website: <https://www.voaindonesia.com/a/asean-desak-indonesia-ratifikasi-perjanjian-terkait-kabut-asap/1692458.html>
- (2013). Singapore PM: Haze from Indonesia Could Blanket City for Weeks - YouTube. Retrieved January 13, 2020, from Voice of America website: <https://www.youtube.com/watch?v=F9QGwDI-oxk>
- Waever, O. (n.d.). *On Security, by Ronnie D. Lipschutz 3. Securitization and Desecuritization*. Retrieved from <http://www.ciaonet.org/book/lipschutz/lipschutz13.html>
- Waltz, K. (1998). International relations theory: Realism, pluralism, globalism. In *International relations theory: Realism, pluralism, globalism*.

----- (1988). The Origins of War in Neorealist Theory. *Journal of Interdisciplinary History*. <https://doi.org/10.2307/204817>

Zengkun, F. (2013). Haze update: PM Lee says Singapore urging Indonesia to take action to reduce haze, Singapore News & Top Stories - The Straits *Times*. Retrieved January 13, 2020, from The Straits *Times* website: <https://www.straitsTimes.com/singapore/haze-update-pm-lee-says-singapore-urging-indonesia-to-take-action-to-reduce-haze>





# BAB 5

## SEKURITISASI ILLEGAL, UNREPORTED AND UNREGULATED FISHING (IUUF) DI INDONESIA

### PENDAHULUAN

Bab ini membahas upaya Indonesia untuk menangani masalah *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* (IUUF) yang merupakan ancaman terhadap kedaulatan dan keamanan maritim Indonesia selama Presiden Joko Widodo (selanjutnya akan disebut Jokowi). Ancaman telah berlangsung selama bertahun-tahun dan sangat merugikan Indonesia karena besarnya jumlah ikan yang dicuri oleh kapal asing dan perusakan ekosistem lautnya. Namun, ancaman ini tidak ditangani dengan tegas oleh pemerintah sebelumnya meskipun hak untuk melakukan penindakan tersebut sah karena perahu-perahu ilegal telah melewati wilayah perairan Indonesia yang memiliki undang-undang dan peraturan untuk mengatasinya. Bersamaan dengan peluncuran Indonesia sebagai *Global Maritime Fulcrum*, Presiden Jokowi mengambil tindakan keras dengan menenggelamkan kapal yang terlibat dalam penangkapan ikan ilegal

di wilayah Indonesia. Pemerintah Indonesia mengatakan bahwa IUUF perlu di atasi dengan metode yang tidak biasa yang dapat memiliki efek jera pada entitas yang terlibat (Ambari, 2018).

Penulis mencoba membahas kebijakan Indonesia untuk menenggelamkan kapal-kapal IUUF ini melalui Teori Sekuritisasi (ST) *Copenhagen School* (CS) dan modifikasi oleh generasi keduanya (Caballero-Anthony, Emmers, & Emmers, 2017) (Balzacq, Léonard, & Ruzicka, 2016). Sekuritisasi IUUF yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia tidak biasa karena dua alasan. Pertama, dalam konteks ST di Eropa, tindakan sekuritisasi dilakukan untuk membawa status masalah keamanan menjadi masalah yang mendesak sehingga tindakan apa pun dapat diambil untuk mengatasinya. Sementara sekuritisasi IUUF di Indonesia dilakukan dalam konteks hukum pelaksanaan. Indonesia sudah memiliki aturan hukum untuk memblokir kapal berbendera asing yang memasuki wilayahnya dan memiliki hak untuk menenggelamkan atau membakarnya dengan cukup bukti, yaitu UU 45/2009 tentang perikanan, Pasal 69 (4). Tetapi karena lemahnya penegakan hukum dan ekosistem yang tahan terhadap kerusakan yang terjadi, pemerintah perlu melakukan sekuritisasi untuk memungkinkan penegakan hukum.

Kedua, proses sekuritisasi ini menarik karena juga dilakukan dalam konteks menjaga keamanan dan kedaulatan negara di mana pada saat yang sama ada dua *referent object* keamanan yaitu negara dan lingkungan. Dengan kata lain, Indonesia telah berusaha untuk memperluas dan memperdalam masalah keamanan terkait dengan wilayah maritimnya. Sekuritisasi dalam konteks kedaulatan nasional tidak hanya mendapat tepuk tangan dari pelbagai kalangan masyarakat

Melalui aksi-aksi wicara besar-besaran dan peran pendukung media, komitmen masyarakat untuk mengatasi ancaman terhadap keamanan maritim Indonesia cukup kuat sebagaimana dibuktikan dengan tingginya tingkat persetujuan untuk kebijakan penenggelaman kapal kapal ilegal oleh pemerintah. Penghargaan tinggi diberikan kepada Menteri KKP di dalam dan luar negeri atas upaya tanpa henti untuk memerangi IUUF. Namun, komitmen sosial itu tetap dalam posisi rapuh karena pelbagai elemen yang sebelumnya diuntungkan oleh manajemen perikanan yang lama masih berharap bahwa situasinya dapat berubah dan kembali ke 'normal' seperti sebelumnya di mana kendali praktik IUUF lemah. Analisis detail masalah ini berada di luar ruang lingkup makalah ini, tetapi dalam konteks ST, ini harus melibatkan studi tentang proses desekuritisasi dan motivasi sekuritisasi aktor dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan perikanan Indonesia.

## REFERENSI

- Acharya, A. (2018). *Constructing Global Order*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781316756768>
- Ambari, M. (2016a). Negara Asia Pasifik Sepakat untuk Perangi Perikanan Tangkap Ilegal : Mongabay.co.id. Retrieved January 26, 2019, from <https://www.mongabay.co.id/2016/07/29/negara-asia-pasifik-sepakat-untuk-perangi-perikanan-tangkap-ilegal/>
- Ambari, M. (2016b). Pemberantasan IUUF Semakin Berat Dilakukan Indonesia, Kenapa? : Mongabay.co.id. Retrieved January 27, 2019, from <https://www.mongabay.co.id/2016/11/10/pemberantasan-iuu-fishing-semakin-berat-dilakukan-indonesia-kenapa/>
- Ambari, M. (2016c). Susi Pudjiastuti Semakin Meradang Sikapi Wacana Perikanan Tangkap untuk Asing : Mongabay.co.id. Retrieved January 27, 2019, from <https://www.mongabay.co.id/2016/08/10/susi-pudjiastuti-semakin-meradang-sikapi-wacana-perikanan-tangkap-untuk-asing/>
- Ambari, M. (2018). Perlu Cara Tak Biasa untuk Berantas IUUF, Bagaimana? : Mongabay.co.id. Retrieved January 26, 2019, from <https://www.mongabay.co.id/2018/08/26/perlu-cara-tak-biasa-untuk-berantas-iuu-fishing-bagaimana/>
- Asril, S. (2014). Jokowi: Saya Sampai Tiga Kali Perintah Penenggelaman kapalkan, Baru Ada Kapal yang Penenggelaman kapal - Kompas.com. Retrieved January 21, 2019, from [https://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/12590591/Jokowi.Saya.Sampai.Tiga.Kali.Perintah.Penenggelaman\\_kapalkan.Baru.Ada.Kapal.yang.Penenggelaman\\_kapal](https://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/12590591/Jokowi.Saya.Sampai.Tiga.Kali.Perintah.Penenggelaman_kapalkan.Baru.Ada.Kapal.yang.Penenggelaman_kapal)

- Balzacq, T. (2011). A theory of securitization: Origins, core assumptions, and variants. In T. Balzacq (Ed.), *Securitization theory: how security problems emerge and dissolve* (Vol. PRIO new s, pp. 1–30). Milton Park, Abingdon: Routledge. Retrieved from <http://www.st-andrews.eblib.com/patron/FullRecord.aspx?p=574521>
- Balzacq, T., Léonard, S., & Ruzicka, J. (2016). ‘Securitization’ revisited: theory and cases. *International Relations*, 30(4), 494–531. <https://doi.org/10.1177/0047117815596590>
- Billy, A. T. (2018). Empat Tahun Pemerintahan Jokowi-JK Penenggelman kapalkan 488 Kapal Asing Pencuri Ikan - [Tribunnews.com](http://www.tribunnews.com). Retrieved January 21, 2019, from <http://www.tribunnews.com/bisnis/2018/08/21/empat-tahun-pemerintahan-jokowi-jk-penenggelman-kapalkan-488-kapal-asing-pencuri-ikan>
- Bondaroff, T. N. P. (2015). *The Illegal Fishing and Organized Crime Nexus*. Retrieved from [www.theblackfish.org](http://www.theblackfish.org)
- Buzan, B. (1997). Rethinking Security after the Cold War. *Cooperation and Conflict*, 32(1), 5–28. <https://doi.org/10.1177/0010836797032001001>
- Buzan, B., Wæver, O., & Wilde, J. de. (1998). *Security : a new framework for analysis*. Lynne Rienner Pub. Retrieved from [https://books.google.co.id/books/about/Security.html?id=j4BGr-Elsp8C&redir\\_esc=y](https://books.google.co.id/books/about/Security.html?id=j4BGr-Elsp8C&redir_esc=y)
- Caballero-Anthony, M., Emmers, R., & Emmers, R. (2017). Understanding the Dynamics of Securitizing Non-Traditional Security, 13–24. <https://doi.org/10.4324/9781315247878-9>
- Fajar, J. (2016). ASEAN Dan Jepang Deklarasikan Perang Terhadap Pencurian Ikan : [Mongabay.co.id](http://Mongabay.co.id). Retrieved January 26,

2019, from <https://www.mongabay.co.id/2016/08/04/asean-dan-jepang-deklarasikan-perang-terhadap-pencurian-ikan/>

Fauzi, A. (2017a). Menteri Susi Ungkap Latar Belakang Pemberantasan “Illegal Fishing”; - Kompas.com. Retrieved February 6, 2019, from <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/07/15/184315026/menteri-susi-ungkap-latar-belakang-pemberantasan-illegal-fishing->

Fauzi, A. (2017b). Susi Dorong Pemberantasan Kejahatan Perikanan Transnasional - Kompas.com. Retrieved January 21, 2019, from <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/09/26/170736526/susi-dorong-pemberantasan-kejahatan-perikanan-transnasional>

Gady, F.-S. (2017). Confirmed: Indonesia to Buy 11 Su-35 Fighter Jets From Russia | The Diplomat. Retrieved January 21, 2019, from <https://thediplomat.com/2017/07/confirmed-indonesia-to-buy-11-su-35-fighter-jets-from-russia/>

Gatra, S. (2014). Jokowi: Peneggelaman Kapal Ilegal Masalah Kriminal, Bukan Masalah Tetangga-tetangga - Kompas.com. Retrieved January 28, 2019, from <https://nasional.kompas.com/read/2014/12/09/15374721/Jokowi.Peneggelaman.Kapal.Ilegal.Masalah.Kriminal.Bukan.Masalah.Tetangga-tetangga>

Global Fishing Watch. (2017). Indonesia VMS Joint Statement - Global Fishing Watch. Retrieved January 21, 2019, from <https://globalfishingwatch.org/initiatives/indonesia-vms/indonesia-vms-joint-statement/>

Hanifah, S. (2018). Jawaban tegas Menteri Susi dan Sri Mulyani saat dikritik Fadli dan Fahri | merdeka.com. Retrieved February 6, 2019, from <https://www.merdeka.com/peristiwa/jawaban->

tegas-menteri-susi-dan-sri-mulyani-saat-dikritik-fadli-dan-fahri/  
jawaban-menohok-menteri-susi.html

- Hutasoit, L. (2018). Deretan “Perseteruan” Menteri Susi dengan Sandiaga. Retrieved February 6, 2019, from <https://www.idnTimes.com/news/indonesia/lia-hutasoit/deretan-perseteruan-menteri-susi-dengan-sandiaga/full>
- Kusuma, H. (2018). 4 Respons Susi ke Luhut soal Penyetopan Peneggelaman Kapal. Retrieved January 27, 2019, from <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4344999/4-respons-susi-ke-luhut-soal-penyetopan-peneggelaman-kapal>
- Kuwado, F. J. (2016). Jokowi ke Natuna, Gelar Ratas di Kapal Perang Imam Bonjol - Kompas.com. Retrieved January 21, 2019, from <https://nasional.kompas.com/read/2016/06/23/07251731/jokowi.ke.natuna.gelar.ratas.di.kapal.perang.imam.bonjol>.
- Manicaros, A. (2017). Boats burned for illegal fishing in Top End | NT News. Retrieved February 9, 2019, from <https://www.ntnews.com.au/lifestyle/boats-burned-for-illegal-fishing-in-top-end/news-story/81e48807435d5d610511445585b17bc8>
- Marta, M. F. (2017). Inisiatif-inisiatif Menteri Susi yang Membuka Mata Dunia – Kompas.Id. Retrieved January 29, 2019, from <https://kompas.id/baca/ekonomi/2017/11/27/inisiatif-inisiatif-menteri-susi-yang-membuka-mata-dunia/>
- Nadlir, M. (2018). Wapres Minta Menteri Susi Hentikan Peneggelaman Kapal - Kompas.com. Retrieved January 28, 2019, from <https://nasional.kompas.com/read/2018/01/09/17501971/wapres-minta-menteri-susi-hentikan-peneggelaman-kapal>

- Nainggolan, P P (2015) Kebijakan Poros Maritim Dunia Joko Widodo Dan Implikasi Internasionalnya (*MariTime Axis Policy and Its International Implications*). *Politica*, 6(2), 167–190.
- Nugraha, I. (2015). Menteri Kelautan Kembali Tegaskan Kembangkan Perikanan Berkelanjutan : Mongabay.co.id. Retrieved January 27, 2019, from <https://www.mongabay.co.id/2015/01/08/menteri-kelautan-kembali-tegaskan-kembangkan-perikanan-berkelanjutan/>
- Nugroho, W. (2018a). Ditentang di Indonesia, Menteri Susi Dipuji Dunia karena Melawan &quot;Illegal Fishing&quot; - Kompas.com. Retrieved January 25, 2019, from <https://nasional.kompas.com/read/2018/06/06/05375421/ditentang-di-indonesia-menteri-susi-dipuji-dunia-karena-melawan-illegal>
- Nugroho, W. (2018b). Kegelisahan Menteri Susi setelah Penenggelaman kapalkan Kapal Pencuri Ikan - Kompas.com. Retrieved February 6, 2019, from <https://nasional.kompas.com/read/2018/06/14/06470031/kegelisahan-menteri-susi-setelah-penenggelaman-kapalkan-kapal-pencuri-ikan>
- Prabowo, D. (2014). Jokowi Disebut Sudah Siap Beli 3 &quot;Drone&quot; dari Amerika - Kompas.com. Retrieved January 28, 2019, from <https://nasional.kompas.com/read/2014/10/09/23084401/Jokowi.Disebut.Sudah.Siap.Beli.3.Drone.dari.Amerika>
- Pregiwati, L. A. (2017). KKP | Kementerian Kelautan dan Perikanan. Retrieved January 31, 2019, from <https://kkp.go.id/artikel/1699-14854>
- Romadoni, A. (2014). KSAD: Tak Setuju Penenggelaman kapalkan Kapal Asing, Tidak Cinta Negara - News Liputan6.com.



Retrieved January 21, 2019, from <https://www.liputan6.com/news/read/2144673/ksad-tak-setuju-peneggelaman-kapalkan-kapal-asing-tidak-cinta-negara>

Soegiarto, Y. (2017). Indonesia's Most Popular Minister | Globe Asia. Retrieved January 21, 2019, from <https://www.globeasia.com/cover-story/indonesias-popular-minister/>

Stritzel, H. (2014). Introduction. In *Security in Translation* (pp. 1–7). London: Palgrave Macmillan UK. [https://doi.org/10.1057/9781137307576\\_1](https://doi.org/10.1057/9781137307576_1)

Sukmana, Y. (2018). Curhat Gubernur Sulut soal Industri Perikanan yang Terpukul - Kompas.com. Retrieved February 9, 2019, from <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/11/14/193900526/curhat-gubernur-sulut-soal-industri-perikanan-yang-terpukul>

Tarry, S. (1999). 'Deepening' and 'Widening': An Analysis of Security Definitions in the 1990s. *Journal of Military and Strategic Studies*, 2(1). Retrieved from <https://jmss.org/article/view/57850/43523>

Thomas, C. (1987). *In search of security: the Third World in international relations* | Sussex University. Brighton: Wheatsheaf.

Waeber, O. (1995). Securitization and Desecuritization. In Ronnie D. Lipschutz (Ed.), *On Security*. Columbia: Columbia University Press. Retrieved from <http://www.ciaonet.org/book/lipschutz/lipschutz13.html>

Widhana, D. H. (2016). Fadli Zon sebut jika dидiamkan Tiongkok caplok wilayah RI di Natuna | merdeka.com. Retrieved February 9, 2019, from <https://www.merdeka.com/politik/fadli-zon-sebut-jika-didiamkan-Tiongkok-caplok-wilayah-ri-di-natuna.html>

- Wijaya, P. (2014). Tiga negara ini dukung Menteri Susi penenggelaman kapalkan kapal asing | merdeka.com. Retrieved January 22, 2019, from <https://www.merdeka.com/dunia/empat-negara-ini-dukung-menteri-susi-penenggelaman-kapalkan-kapal-asing/amerika-serikat.html>
- Yuniarto, T. (2017). Memandang Kedaulatan Maritim Indonesia – Kompas.Id. Retrieved January 29, 2019, from <https://kompas.id/baca/x/politik/2017/08/21/jajak-pendapat-kompasmemandang-kedaulatan-maritim-indonesia/>



# KESIMPULAN

Globalisasi yang berkembang pada abad ke-21 membawa pengaruh pada studi keamanan internasional. Globalisasi satu sisi memberi peluang kepada masyarakat internasional untuk melakukan interaksi dan transaksi internasional dengan lebih mudah. Kecanggihan teknologi komunikasi dan transportasi memudahkan masyarakat untuk berinteraksi dengan masyarakat di belahan bumi yang lain. Namun, di samping keuntungan tersebut, globalisasi juga memicu muncul dan meluasnya kejahatan-kejahatan transnasional seperti *human trafficking*, *drug trafficking*, penyebaran HIV/AIDS, terorrisme, dan sebagainya. Permasalahan ini memicu pergeseran fokus studi keamanan internasional dari yang semula hanya fokus tentang keamanan tradisional (keamanan negara dalam konteks keamanan militer, teritori, serta kedaulatan dan kepentingan nasional) meluas menjadi keamanan non-tradisional yang menyangkut isu-isu keamanan individu dalam kehidupan sehari-hari.

Isu keamanan non-tradisional ini mendorong UNDP untuk merumuskan konsep *human security* yang terdiri dari tiga elemen, yaitu *freedom from want, fear, dan to live in dignity*. Keamanan manusia atau yang sering juga disebut sebagai keamanan insani dapat diartikan sebagai *safety from such chronic threats as hunger, disease and repression, as well as 'protection from sudden and hurtful disruptions in the patterns of daily life-whether in homes, in jobs or in communities'* (UNDP, 1994: 23). Konsep keamanan ini memuat jangkauan yang luas terkait dengan perlindungan keamanan manusia dalam kehidupan sehari-hari baik terhadap kekerasan langsung (*direct violence*) maupun kekerasan struktural (*structural violence*).

Seiring dengan perkembangan tersebut, *Copenhagen School* yang dipelopori oleh Barry Buzan mencetuskan konsep sekuritisasi. Konsep ini bermanfaat untuk menjelaskan bagaimana proses munculnya isu keamanan, baik yang bersifat tradisional maupun non-tradisional. Pada esensinya, sekuritisasi merupakan proses menjadikan isu biasa yang bersifat non-politis menjadi sebuah isu penting yang memerlukan kebijakan politik. Konsep Buzan ini dikritik oleh ilmuwan lain memiliki beberapa kelemahan, antara lain adalah tidak menjelaskan motif sekuritisasi, tidak memiliki ukuran yang jelas tentang efektivitas sekuritisasi, serta bersifat *European Centris* (Caballero-Anthony, Emmers, and Acharya 2004).

Dalam perkembangannya, teori sekuritisasi mengalami modifikasi terutama terkait dengan area pembahasan, aktor, peran *speech act*, luaran dan dampak sekuritisasi, serta kondisi-kondisi yang memengaruhi sekuritisasi dan desekuritisasi. Untuk mendalami lebih jauh tentang

sekuritisasi, buku ini mengkaji penerapan teori sekuritisasi dalam kasus-kasus keamanan non-tradisional di Asia. Bab 1 buku ini mengkaji tentang sekuritisasi eksploitasi seksual anak laki-laki di bawah umur di Afghanistan. Bab 2 membahas tentang sekuritisasi terhadap Muslim Uighur di Xinjiang Tiongkok. Sementara itu, buku ini juga membahas tentang sekuritisasi narkoba di Filipina di Bab 3. Bab 4 buku ini membahas tentang sekuritisasi kabut asap di ASEAN, Singapura, dan Indonesia. Berdasarkan studi kasus di beberapa wilayah Asia tersebut, buku ini menggarisbawahi atau menambahkan hal-hal yang penting terkait dengan teori sekuritisasi. Buku ini mengidentifikasi hal-hal penting yang berpengaruh terhadap sekuritisasi, antara lain adalah peran *agency and structure* serta *media framing* dalam sekuritisasi.

*Agency* merujuk pada kapasitas atau kapabilitas aktor untuk bertindak sesuai dengan preferensinya tanpa campur tangan pihak lain. Sementara itu, *structure* merupakan aturan, norma, atau struktur sosial lainnya yang mungkin mendukung atau menghambat peran aktor dalam pengambilan kebijakan. Dalam hal ini, *agency* merupakan atribut-atribut internal yang dimiliki oleh aktor, sementara *structure* adalah aspek eksternal atau di luar aktor yang berpengaruh. Ilmuwan masih memperdebatkan apakah *agency* ataukah *structure* yang sesungguhnya berperan dalam memengaruhi kebijakan politik. Namun tulisan ini berpendapat bahwa dikotomi apakah *structure* atau *agency* yang berperan adalah kurang relevan. *Agency* berpengaruh dalam proses politik jika seorang aktor memiliki power, kapasitas, maupun kapabilitas yang tinggi. Sebaliknya jika aktor lemah dan didikte oleh lingkungan

sosial politiknya, maka dalam hal ini *structure* lebih berpengaruh dalam kebijakan politik dibandingkan dengan *agency*.

Esensi dari sekuritisasi adalah bagaimana *speech* atau kata-kata yang disampaikan oleh *speakers* memengaruhi *hearers*. Bagaimana *speakers* meyakinkan *audience* tentang keberadaan ancaman serta perlunya tindakan-tindakan atau kebijakan politis untuk menanggulangi ancaman tersebut. Dalam hal ini kapasitas dan kapabilitas aktor dalam menyebarkan informasi dan meyakinkan atau mempersuasi pendengar sangat berpengaruh terhadap keberhasilan sekuritisasi. Kata-kata atau *speech* memiliki kekuatan (*powerful*) jika disampaikan oleh aktor yang memiliki power dan kedudukan serta bagaimana strategi yang dimainkan oleh aktor dalam meyakinkan pendengar. Kemampuan aktor untuk menafsirkan preferensi politik dan kebutuhan *audience* serta mampu menggunakan bahasa-bahasa yang persuasif berkontribusi pada keberhasilan sekuritisasi.

Di samping itu, *agency* juga berpengaruh tidak hanya dalam proses konstruksi sebuah ancaman, namun *agency* juga berpengaruh terhadap pilihan-pilihan tindakan politis yang diambil untuk menanggulangi ancaman yang telah dikonstruksi tersebut. Meskipun aktor-aktor telah menyepakati tentang adanya ancaman yang nyata, namun kebijakan politis yang diambil sangat mungkin berbeda. Di sinilah esensi peran *agency* dalam sekuritisasi di mana kapasitas, kapabilitas ataupun atribut-atribut lain yang dimiliki oleh aktor berpengaruh dalam konstruksi sebuah ancaman dan tindakan penanggulangannya.

Struktur lingkungan sosial, ekonomi, politik dapat berpengaruh pada efektivitas sekuritisasi, baik menghambat ataupun mendukungnya.

*Audience* yang merupakan target sekuritisasi memiliki latar belakang budaya, konteks politik, serta struktur sosial yang berbeda-beda. Pemahaman yang baik tentang *structure* sangat penting bagi efektivitas sekuritisasi. Di samping itu, struktur atau konstelasi politik ataupun kompleksitas keamanan di mana aktor-aktor sekuritisasi maupun *audience* berada berpeluang berpengaruh dalam sekuritisasi. Dalam tataran pemerintah suatu negara, struktur global seperti perjanjian internasional, norma universal, ataupun *power relations* antarnegara berpengaruh terhadap sekuritisasi dan kebijakan politik yang diambil. Demikian pula hanya dengan struktur domestik seperti kepentingan ekonomi politik aktor domestik berpengaruh terhadap konstuksi sebuah ancaman. Pemerintah cenderung tidak mengambil kebijakan politik yang merugikan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap struktur sosial dan politik yang ada sangat penting dalam proses sekuritisasi. Pengaruh *structure and agency* dalam sekuritisasi dapat dilihat dalam beberapa studi kasus sekuritisasi di Asia yang dijabarkan dalam bab 1 hingga bab 4 buku ini.

Studi tentang sekuritisasi tradisi *bacha bazi* di Afghanistan menemukan bahwa kelima faktor penentu keberhasilan sebuah proses sekuritisasi tidak dapat terpenuhi dengan baik pada proses tersebut. Aktor-aktor inisiasi proses sekuritisasi *bacha bazi* menggunakan konsep keamanan nasional agar pemerintah Afghanistan ingin terlibat dalam upaya sekuritisasi *bacha bazi*. Para aktor menyajikan *bacha bazi* sebagai sebuah ancaman terhadap kestabilan ekonomi dan politik Afghanistan. Hal ini didukung oleh adanya pernyataan masyarakat korban *bacha bazi* di Afghanistan yang masih berjuang bersama Taliban demi



mendapatkan keamanan yang mampu dipenuhi di bawah kekuasaan Taliban. Walaupun para aktor yang meninisiasi adanya sekuritisasi telah berhasil melibatkan pemerintah, sekuritisasi terhadap *bacha bazi* mengalami kegagalan disebabkan oleh tingkat korupsi dan kemiskinan yang tinggi di Afghanistan. Sebagai salah satu dari negara terkorup di dunia menjadikan hukum di Afghanistan sebagai sebuah komoditi yang dapat diperjual-belikan. Pada akhirnya, lingkaran *bacha bazi* tidak dapat dihentikan meski pemerintah telah melakukan *speech act* yang meletakkan urgensi terhadap *bacha bazi* sebagai sebuah ancaman manusia dan ancaman terhadap stabilitas politik dan ekonomi nasional.

Studi tentang sekuritisasi terhadap Muslim Uighur di Xinjiang Tiongkok menemukan bahwa upaya sekuritisasi yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok merupakan salah satu contoh bagaimana *speech act* digunakan untuk membentuk konstruksi akan Muslim Uighur sebagai sebuah ancaman nasional. Diskriminasi sistematis yang dilakukan pemerintah Tiongkok memunculkan kemarahan di kalangan etnis Uighur. Sebagai hasilnya, masyarakat Uighur melakukan demonstrasi dan sebagian dari mereka juga melakukan penyerangan terhadap warga etnis Han di Xinjiang atau melakukan bom bunuh diri sebagai aksi protes. Serangan-serangan tersebut digunakan oleh pemerintah Tiongkok dalam melakukan propaganda dan mengonstruksi opini publik mengenai Muslim Uighur. Setelah adanya *speech act* yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok, selanjutnya pemerintah melakukan beberapa langkah ekstrem seperti penahanan dan pengawasan secara ketat di provinsi Xinjiang. Meski potret Muslim Uighur yang dianggap sebagai ancaman bagi masyarakat Tiongkok adalah alasan utama adanya

sekuritisasi terhadap etnis tersebut, nyatanya inisiasi program OBOR juga melatarbelakangi adanya proses sekuritisasi tersebut. Keinginan dan kebutuhan akan pasokan energi membuat pemerintah Tiongkok berusaha untuk dapat menguasai sumber daya alam mineral di Xinjiang. Selain itu, program pemerintah untuk mencapai angka satu juta pekerja tekstil pada tahun 2023 juga menjadi salah satu alasan Muslim Uighur ditangkap dan dimasukkan ke kamp re-edukasi. Pemerintah Tiongkok, melalui beberapa kesaksian mantan tahanan, memperkerjakan Muslim Uighur secara paksa di kamp-kamp tersebut dan menanamkan paham-paham komunis untuk menghapus nilai-nilai agama dari Muslim Uighur. Walaupun pemerintah Tiongkok tetap pada pendiriannya dan memberikan bingkai yang baik terhadap kamp re-edukasi ke mata internasional, banyak organisasi internasional yang mengecam segala bentuk pelanggaran HAM yang di atasnamakan kepentingan keamanan nasional oleh Tiongkok.

Kajian tentang sekuritisasi narkoba di Filipina menunjukkan bahwa peran *agency* sangat menentukan bagaimana persepsi tentang sekuriti/keamanan, serta sekuritisasi yang dijalankan. Kebijakan penanggulangan narkoba yang diambil oleh pemerintah Filipina beragam, mulai dari yang ringan, moderat, hingga ekstrem. Hal ini dipengaruhi oleh preferensi dan bagaimana presiden menafsirkan narkoba sebagai sebuah ancaman. Presiden Rodrigo Duterte menjadi figur dan aktor sentral dalam sekuritisasi narkoba di Filipina sejak tahun 2016 ketika ia terpilih sebagai presiden Filipina. Program utama pemerintahannya yaitu perang terhadap narkoba bertujuan untuk memberantas narkoba hingga ke akar-akarnya. Oleh karena itu, Duterte menerapkan kebijakan ekstrem

berupa tembak di tempat pelaku pengedar dan pengguna narkoba. Sekuritisasi ini relatif berhasil terbukti dengan menurunnya jumlah pengguna narkoba setahun setelah program 'war on drug' dilancarkan oleh Duterte. Ditinjau dari sisi *agency*, efektivitas sekuritisasi di Filipina ini tidak terlepas dari karakter, kapasitas, dan kapabilitas Duterte dalam menjalankan kebijakannya memerangi narkoba. Meskipun dikritik oleh banyak pihak serta munculnya counter-movements terhadap kebijakannya dengan mengatasnamakan HAM, Duterte tetap teguh menjalankan program *war on drug* yang dilancarkannya.

Berbeda dengan kasus narkoba di Filipina yang menonjolkan peran *agency* dalam sekuritisasi, peran *structure* lebih menonjol dalam sekuritisasi kasus kabut asap di Asia Tenggara. Kabut asap Asia Tenggara akibat kebakaran hutan di Indonesia telah terjadi sejak tahun 1960-an dan berdampak di Malaysia dan Singapura. Kedua negara yang terdampak ini melakukan aksi protes maupun mengirimkan nota diplomatik kepada Indonesia. Mereka juga melakukan lobi di tingkat regional agar ASEAN membentuk seperangkat perjanjian tentang penanggulangan kabut asap. Perjanjian kabut asap berhasil dirumuskan pada tahun 2002 di mana Indonesia baru meratifikasi perjanjian tersebut 12 tahun kemudian, yaitu pada tahun 2014. Buku ini berpendapat bahwa faktor *structure* dominan memengaruhi sekuritisasi kabut asap ini.

*Structure* pada level regional Asia Tenggara yang menghambat penanggulangan kabut asap adalah prinsip ASEAN way di mana negara-negara ASEAN sepakat untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Meskipun kabut asap telah menjadi polusi transnasional, tetapi sumber permasalahan ada dalam ranah domestik Indonesia.

Sepanjang Indonesia tidak meratifikasi perjanjian kabut asap tersebut, negara-negara ASEAN tidak dapat memaksa Indonesia untuk mematuhi kesepakatan tersebut. Dari sisi internal Indonesia, faktor struktur ekonomi politik pembangunan menyebabkan persoalan kebakaran hutan dan kabut asap sulit ditangani. Pemerintah Indonesia semenjak Presiden Soeharto, B.J. Habibie, SBY, maupun Jokowi menaruh perhatian besar terhadap masalah kabut asap tersebut. Bahkan mereka selalu meminta maaf kepada Malaysia dan Singapura atas dampak kabut asap yang melanda kedua negara tersebut baik secara langsung maupun melalui media masa. Namun sekuritisasi ini berbenturan dengan kepentingan ekonomi politik sehingga menyebabkan tidak optimalnya penanggulangan kebakaran hutan dan kabut asap.

Studi kasus pada buku ini juga menjelaskan bagaimana *media framing* berperan dalam sekuritisasi. Di satu sisi, sekuritisasi merupakan produk kerja media masa melalui *media framing*. Di sisi lain, sekuritisasi yang dilakukan oleh aktor-aktor politik menjadi lahan berita bagi media. *Framing* memungkinkan para jurnalis untuk menulis secara rutin atau reguler berita yang menarik perhatian masa. Pemberitaan secara terus menerus oleh media tentang kasus tertentu, tentang dampak negatif atau ancaman yang mungkin ditimbulkannya akan memengaruhi pandangan masyarakat (*audience*). Oleh karena itu, buku ini berpendapat bahwa *media framing* sangat berperan dalam proses sekuritisasi.

Media masa berperan sebagai mediator dalam *speech act* yang menghubungkan aktor sekuritisasi dengan *audience* dengan cara memberitakan secara terus-menerus suatu kasus hingga *audience*

terpengaruh bahwa hal yang diberitakan tersebut benar-benar sebuah ancaman. Dalam proses ini terdapat *discourse of security* yang difasilitasi oleh media yang di dalamnya media berperan aktif dalam proses *agenda setting*. Agenda setting ini merujuk pada proses penentuan berita mana yang akan ditonjolkan oleh media masa, sementara itu media framing merujuk pada aspek apa dari berita yang telah dipilih tersebut yang akan ditonjolkan atau dihilangkan sehingga membentuk opini publik tertentu. Dengan kata lain media masa berperan tidak hanya menyebarkan berita tentang kasus tertentu, tetapi juga mengonstruksi bagaimana cara masyarakat atau *audience* memahami kasus tersebut. Media masa tidak hanya menyebarkan beritan, namun mengemas berita tersebut sedemikian rupa sehingga pesan sekuritisasi ataupun desekuritisasi tersampaikan kepada masyarakat.

Selain sebagai mediator, media masa sering kali turut andil dalam proses sekuritisasi. Mereka sering kali memiliki kedekatan khusus dengan aktor sekuritisasi maupun pihak-pihak lain yang terdampak sekuritisasi. Dalam beberapa kasus, media sangat mungkin berpihak pada aktor tertentu, baik untuk melakukan sekuritisasi maupun desekuritisasi. Media masa dalam hal ini tidak bebas nilai dan memiliki agenda tersendiri yang menguntungkan mereka. Media masa sering kali juga dimiliki oleh perusahaan yang memiliki afiliasi dengan lembaga yang terkait dengan kasus yang disekuritisasi. Oleh karena itu, pemahaman tentang peran media masa dalam melakukan framing atas kasus tertentu sangat penting untuk memahami proses sekuritisasi secara comprehensive. Dengan kata lain, pemahaman tentang komunikasi

politik, yang belum dibahas secara detil oleh *Copenhagen School*, sangat bermanfaat untuk memahami sekuritisasi.

Studi tentang sekuritisasi terhadap penangkapan ikan ilegal atau IUUF di Indonesia menemukan keunikan pada motifasi yang melatar belakangi adanya sekuritisasi terhadap IUUF. Ketika konsep sekuritisasi dari mazhab Copenhagen menyatakan bahwa tindakan sekuritisasi dilakukan untuk membawa status masalah keamanan menjadi masalah yang mendesak sehingga tindakan apa pun dapat diambil untuk mengatasinya, langkah Indonesia dalam memberlakukan hukuman penenggelaman kapal asing adalah bentuk pelaksanaan peraturan yang diawasi oleh UU 45/2009 tentang perikanan, Pasal 69 (4). Meski pemberlakuan aturan tersebut mendapatkan dukungan dari sebagian besar masyarakat Indonesia, pemerintah memutuskan untuk tidak langsung melakukan aplikasi dari aturan tersebut. Sebaliknya, pemerintah Indonesia melakukan pendekatan kepada negara-negara tetangga untuk meminimalisir adanya ketegangan yang mungkin muncul setelah pemberlakuan aturan tersebut. Setelah pengaplikasian aturan penenggelaman kapal asing yang melakukan IUUF di wilayah perairan Indonesia, pemerintah mampu mendapatkan kepercayaan publik Indonesia. Kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap kinerja pemerintah meningkat setelah adanya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan nelayan Indonesia.

Selain itu, dalam proses sekuritisasi IUUF beberapa negara tetangga, utamanya Taiwan melakukan protes kepada pemerintah Indonesia. Protes tersebut dilayangkan karena kebijakan Indonesia dinilai terlalu keras dalam menyikapi IUUF. Namun, cara Indonesia dalam mempromosikan

kebijakannya juga menjadi bahasan yang menarik. Indonesia mengemas kebijakannya sebagai sebuah cara untuk tidak hanya menghentikan praktik IUUF, tetapi juga sebagai upaya untuk melindungi ekosistem laut yang terancam. Ekosistem laut menjadi salah satu objek sekuritisasi yang dilakukan oleh Indonesia karena ditemukannya kerusakan di ekosistem laut Indonesia akibat racun, bom dan lampu serta metode penangkapan ikan yang digunakan kapal-kapal asing. Sebagai hasil, sekuritisasi terhadap IUUF tetap berjalan dengan baik dan diterima oleh masyarakat dan publik internasional sebagai sebuah gebrakan untuk menyelamatkan wilayah negara itu sendiri dan ekosistem laut.

# GLOSARIUM

AATHP	: The ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution
ACPT	: ASEAN Cooperation Plan On Transboundary Pollution
ADS	: African Drug Syndicate
AI	: Amnesty Internasional
AIHRC	: Afghan Independent Human Rights Commission
AS	: Amerika Serikat
ASEAN	: Association Of South East Asia Nations
ASEP	: ASEAN Environmental Program
ATS	: Amphetamine Type Stimulant
CCTV	: Closed-Circuit Television
Cifor	: Center for International Forestry Research
CPC	: Communist Party Of Tiongkok
CS	: <i>Copenhagen School</i>
CSIS	: Center For Strategic And International Studies
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DVD	: Digital Video Disk
ESCAP	: The United Nations Economic And Sosial Commission For Asia And The Pacific
EU	: Europe Union/ Uni Eropa
FAO	: The Food And Agriculture Organization Of The United Nations
HAM	: Hak Asasi Manusia
HRW	: Human Right Watch
ICC	: International Criminal Court



ICIJ	: Internasional Consorsium Investigative Journalists
Inpres	: Instruksi Presiden
INTERPOL	: International Police
IUUF	: Illegal, Unreported and Unregulated Fishing
KRI	: Kapal Perang Indonesia (KRI)
KKP	: Menteri Kelautan Dan Perikanan
NGO	: Non-Government Organisation
NTS	: Non Traditional Security
OBOR	: One Belt One Road
PACE	: Parents Against Child Exploitation
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PDEA	: The Philippine Drug Enforcement Agency
PSMA	: Port State Measures Agreement (PSMA)
RA	: Republic Act
RFMO	: Regional Fisheries Management Organization
RI	: Republik Indonesia
SBY	: Susilo Bambang Yodhoyono
ST	: Security Studies
UNDP	: United Nations Development Programme
UNEP	: United Nations Environment Programme
UNODC	: The United Nations Offices On Drugs And Crime
UU	: Undang-Undang
WHO	: World Health Organisation
WWF	: World Wild Fund
ZEE	: Zona Ekonomi Eksklusif

# INDEKS

AIHRC, 13, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 30, 31, 34, 40, 154  
ASEAN, 14, 70, 89, 93, 94, 96, 97, 99, 101, 104, 106, 107, 108, 109, 110,  
111, 112, 113, 116, 125, 132, 133, 142, 147, 150, 151, 154, 159  
bacha bazi, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,  
34, 35, 36, 39, 40, 42, 148  
*Copenhagen School*, 2, 5, 15, 67, 89, 97, 118, 146, 152, 154  
diskriminasi, 49, 51, 60, 61  
ekosistem laut, 15, 119, 129, 153  
Eksplorasi seksual, 17, 26  
Filipina, 14, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82,  
83, 84, 125, 128, 135, 137, 139, 147, 150, 159  
Framing, 67, 87, 89, 99, 100, 106, 107, 151  
Indonesia, 2, 14, 15, 66, 70, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103,  
104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,  
119, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135,  
136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 150, 151, 152,  
153, 154, 155, 158, 159  
IUUF, 15, 118, 119, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 134,  
135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 152, 153, 154  
Jepang, 158  
kedaulatan negara, 4, 119, 125  
Model Sekuritisasi, 9  
Non-Traditional Security, 4, 15, 41, 63, 142, 158, 159  
OBOR, 50, 51, 149, 155

PBB, 5, 13, 14, 29, 30, 31, 34, 40, 59, 60, 73, 82, 83, 124, 127, 131, 155  
Presiden Joseph Estrada, 74  
Rodrigo Duterte, 14, 66, 74, 78, 85, 86, 87, 88, 89, 150  
Sekuritisasi HAM, 82  
Sekuritisasi kabut, 97, 98, 100, 102, 106, 110, 111  
Sekuritisasi Narkoba, 14, 66, 69, 70, 72, 73, 74, 77, 78, 82,  
*Speech act*, 6, 49, 67, 68, 121  
Studi keamanan, 4, 44  
Tiongkok, 13, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60,  
61, 62, 127, 128, 135, 137, 139, 149  
Two-Level Games, 14, 94, 96, 110, 115  
Uighur, 13, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,  
62, 64, 65, 147, 149, 159  
Xinjiang, 13, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,  
61, 62, 63, 64, 147, 149, 15

## TENTANG PENULIS

**AGUS TRIHARTONO** adalah Staf Pengajar di Departemen Hubungan Internasional, Universitas Jember, Indonesia. Ia pernah menjadi peneliti di Ritsumeikan Global Innovation Research Organization (R-GIRO), Ritsumeikan University, Jepang. Saat ini, ia adalah peneliti di Pusat Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora [C-RiSSH] dan Institute for *MariTime* Studies [IMaS] Universitas Jember, dan Pilar Data Research and Consulting (Pilar Data Indonesia). Minat penelitiannya adalah Regionalisme Asia, Human Security, Kebijakan Luar Negeri dan Diplomasi, Soft Power, Keamanan Maritim, dan Polling Politik. Ia menyelesaikan program Doktor dan Magisternya di Graduate School of International Relations, Ritsumeikan University, Kyoto, Jepang.

**SUYANI INDRIASTUTI** adalah Staf Pengajar pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Jember, Indonesia. Ia pernah menjadi peneliti di Institute of Asia Pacific Studies, University of Nottingham, Inggris. Saat ini, ia adalah peneliti di Pusat Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora [C-RiSSH], Universitas Jember. Minat penelitiannya adalah Ekonomi

Politik Internasional, Sustainable Development, Resources Politics, dan Human Security. Ia menyelesaikan program Doktor di School of Politics and International Relations, University of Nottingham, Inggris.

**CHAIRUN NISYA** adalah Research Assistant di Pusat Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora [C-RiSSH] dalam Riset tentang Identifikasi dan Konstruksi Gastrodiplomasi Indonesia, Universitas Jember. Ia baru saja menyelesaikan studi Sarjananya di Departemen Hubungan Internasional Universitas Jember pada tahun 2018. Minat penelitiannya adalah Diplomasi Publik, Soft Power, Studi Keamanan, Non-Traditional Security dan Resolusi Konflik.